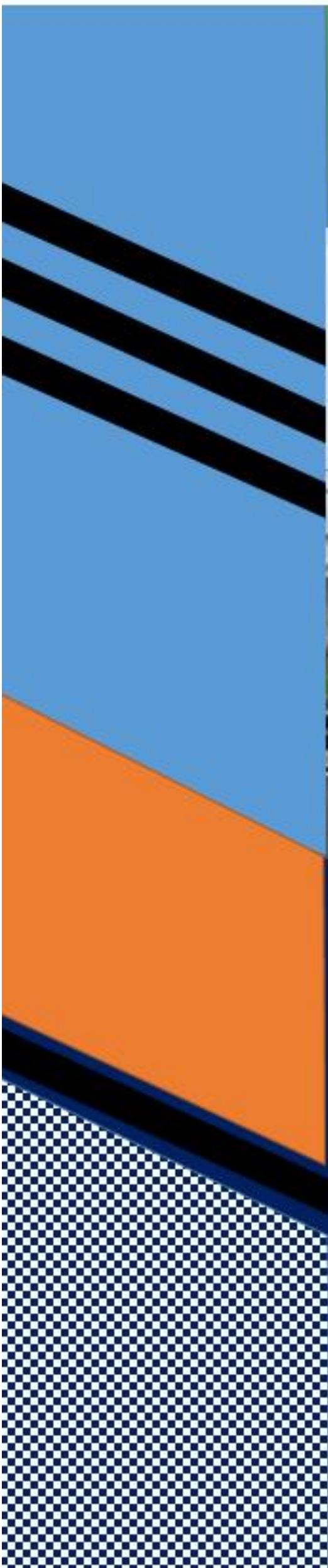




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024



**KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jl. Merdeka Timur, Siswodipuran, Boyolali 57311, Provinsi Jawa Tengah
Email: inspektorat@boyolali.go.id
Web: www.boyolalikab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Boyolali, 14 Maret 2025



Drs. GATOT MURDIYANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19691115 199003 1 006

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas kehendak-Nya kami dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan kepemerintahan di Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dengan baik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Dalam hal ini kami sampaikan terima kasih kepada perangkat daerah Kabupaten Boyolali dan semua pihak yang telah bekerja dan berperan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Boyolali Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Boyolali atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah disepakati di awal tahun anggaran, dan telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Boyolali tahun 2024. Selain itu, dokumen ini disusun guna memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini berisi informasi tentang perencanaan kinerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta mengemukakan juga permasalahan, upaya pemecahan dan saran. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan, utamanya bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan.

Kami menyadari, bahwa masih banyak kekurangan pada akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali, baik dari aspek kinerja maupun penyajian laporan ini, oleh karena itu kami berharap adanya masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	1
1.3. Gambaran Umum Daerah	1
1.3.1. Kondisi Geografis	1
1.3.2. Kondisi Demografi	2
1.3.3. Kewenangan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan	2
1.3.4. Perangkat Daerah	4
1.4. Isu Strategis Daerah	7
1.5. Prioritas dan Arah Kebijakan	8
1.6. Sistematika Penyusunan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Pengukuran Kinerja	13
3.2. Analisa Pengukuran Kinerja	15
3.3. Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan	5
Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan.....	6
Tabel 1.4 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024	7
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.....	12
Tabel 3.1 Skala Ordinal Capaian Kinerja.....	14
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2024.....	14
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Tujuan 1	15
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1	15
Tabel 3.5 Capaian PDRB Setiap Sektor Tahun 2021-2024	16
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Tujuan 2.....	20
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2	20
Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Tujuan 3.....	23
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 3	23
Tabel 3.10 Capaian Komponen IPM Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2024	25
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4	28
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4	29
Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja Tujuan 5.....	33
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 5	33
Tabel 3.15 Capaian Komponen IDG Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2024	34
Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Tujuan 6.....	38
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6	39
Tabel 3.18 Capaian Komponen Nilai Tukar Petani Kabupaten Boyolali	40
Tabel 3.19 Pencapaian Kinerja Tujuan 7	42
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 7	43
Tabel 3.21 Capaian Variabel IPPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2024	44
Tabel 3.22 Pencapaian Kinerja Tujuan 8.....	49
Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 8	49
Tabel 3.24 Capaian Komponen IKLH Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2024.....	50
Tabel 3.25 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 - 2024	56
Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Per Tujuan Pembangunan Tahun 2024	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 – 2024	16
Grafik 3.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Boyolali 2021 - 2024	21
Grafik 3.3 Perkembangan IPM Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2024	24
Grafik 3.4 Indeks Resiko Bencana 2021-2024	29
Grafik 3.5 Angka Konflik Sosial 2021-2024	31
Grafik 3.6 Indeks Pemberdayaan Perempuan 2021-2024	34
Grafik 3.7 Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 - 2024	36
Grafik 3.8 Perkembangan Indeks Desa Membangun 2021-2024	37
Grafik 3.9 Nilai Tukar Petani Kabupaten Boyolali 2021- 2024	39
Grafik 3.10 Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2020- 2024	43
Grafik 3.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021 - 2024.....	50
Grafik 3.12 Indeks <i>Smart City</i> Tahun 2021-2024.....	52

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menetapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang didalamnya telah memuat Indikator Kinerja Utama. Guna pelaksanaan rencana tahunan maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta perubahannya, yang disusun berdasarkan RPJMD 2021-2026, sebagai dasar pelaksanaan pembangunan tahun 2024.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Dalam laporan ini memuat informasi hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang mendukung Visi dan Misi Bupati. Visi Bupati sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 adalah **“Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi” Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)**, yang dijabarkan dalam 5 (lima) Misi yaitu:

- 1) Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi Dan Berkelanju
- 2) tan;
- 3) Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya;
- 4) Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
- 5) Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya; dan
- 6) Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri Dan Berdaya Saing.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan sebanyak 8 (delapan) tujuan dengan 12 (dua belas) indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Boyolali, yaitu:

- 1) Laju pertumbuhan ekonomi
- 2) Tingkat kemiskinan
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 4) Indeks Resiko Bencana (IRB)
- 5) Angka konflik sosial
- 6) Indeks pemberdayaan gender
- 7) Angka PMKS
- 8) Indeks Desa membangun
- 9) Nilai tukar Petani
- 10) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)
- 11) Indeks kualitas lingkungan hidup
- 12) Indeks smart city

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 12 (dua belas) IKU tersebut, maka capaian rata-rata sebesar **106.7%**, dengan kategori **sangat tinggi**. Hasil pengukuran terhadap IKU telah dilakukan analisa yang meliputi capaian kinerja 2024, perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya, progres pencapaian target akhir RPJMD, dan perbandingan dengan realisasi tertinggi secara nasional atau rata-rata nasional (jika

ada), faktor pendukung keberhasilan, hambatan dan solusi serta program dan anggaran pendukung pencapaian IKU tersebut.

Hal utama yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah adanya upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara bersama (kolaboratif) antar Perangkat Daerah dengan Instansi lainnya yaitu Pemerintah Desa dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali serta pihak swasta. Upaya tersebut diawali dengan pembenahan data kemiskinan melalui gerakan satu data Boyolali, yang berbasis RT sebagai organisasi terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selanjutnya dibentuk Tim “Tanggap Sosial” yang dilanjutkan dengan grup *Whatshap* (WA) Tanggap Sosial yang membahas, menangani dan menyelesaikan permasalahan sosial dalam masyarakat, termasuk didalamnya penanganan fakir miskin, orang sakit, lanjut usia, orang dengan kebutuhan khusus, orang dengan gangguan jiwa, dan permasalahan sosial lainnya. Atas upaya tersebut telah membawa hasil yang signifikan di Boyolali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, angka kemiskinan Kabupaten Boyolali mengalami penurunan sebesar 0.18 dari tahun 2023. Angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 9.82%, tahun 2023 sebesar 9.81% dan tahun 2024 sebesar 9.63%.

Pemerintah kabupaten Boyolali juga telah menunjukkan keberhasilannya dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pro investasi. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, nilai investasi Kabupaten Boyolali tahun 2024 sebesar Rp3.045.473.744.959,00 jauh melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar Rp1.830.706.930.000,00. Dengan adanya capaian nilai investasi sebesar 166% tersebut mampu menurunkan angka pengangguran terbuka yang cukup signifikan dari 4.05% pada tahun 2023, menjadi 3.16% pada tahun 2024. Dalam hal Penyelenggaraan Pemerintahan juga telah menunjukkan peningkatan dengan capaian predikat Memuaskan (A) pada penilaian Reformasi Birokrasi, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing dan secara terus menerus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi baik general maupun tematik.

Anggaran yang tersedia untuk Belanja Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2024 untuk belanja sebesar Rp2.562.353.520.000,00, realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp2.418.557.735.103,00 atau 94.39% (*Realisasi unaudited*).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perjanjian Kinerja Bupati Boyolali Tahun 2024. Selanjutnya dalam laporan ini akan menyajikan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Boyolali adalah:

1. Memberikan informasi tentang pelaksanaan perencanaan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja Pemerintah dalam rangka pengambilan kebijakan dan perbaikan kinerja tahun berikutnya; dan
3. Sebagai laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Boyolali atas pelaksanaan kinerja tahun 2024.

1.3. Gambaran Umum Daerah

1.3.1. Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Boyolali terletak antara $110^{\circ} 22'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 7'$ – $7^{\circ} 36'$ Lintang Selatan dengan ketinggian antara 75 – 1500 meter di atas permukaan laut. Posisi Kabupaten Boyolali berada pada jalur penghubung di antara tiga kota besar yaitu Solo, Yogyakarta dan Semarang sehingga posisinya menjadi sangat strategis. Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Boyolali yang secara umum memiliki potensi pada sektor pertanian, peternakan dan industri.

Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah sebesar 101.510 ha, yang menempati 3.09% dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Kemusu dengan luas 8.143 ha, atau sekitar 8,07% dari luas seluruh wilayah, sedangkan Kecamatan Sawit memiliki luas daerah paling kecil yaitu 1.723 ha, atau sekitar 1.76% dari seluruh wilayah Kabupaten Boyolali, terdiri dari 22 Kecamatan, 261 Desa dan 6 Kelurahan. Secara administratif Boyolali berbatasan dengan wilayah Kabupaten lain yaitu:

1. Sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang.

Secara umum topografi Kabupaten Boyolali terbagi ke dalam beberapa wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut (dpl). Wilayah yang termasuk ke dalam dataran tinggi berada di bagian barat yang meliputi Kecamatan Selo, Cepogo dan Ampel, ketinggian wilayah tersebut berada di kisaran 1.000 – 1500 Mdpl. Sedangkan wilayah paling rendah secara umum berada di bagian selatan, tengah dan utara Kabupaten Boyolali yang meliputi Kecamatan Teras, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Ngemplak, Simo, Nogosari, Kemusu, Karanggede, Wonosamodro, Juwangi, Wonosegoro, Sambi dan Sebagian Kecamatan Boyolali, yaitu berada di kisaran 75 – 400 Mdpl.

1.3.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Boyolali pada akhir Tahun 2024 sebesar 1.099.850 jiwa yang terdiri dari 552.325 jiwa penduduk laki-laki dan 547.525 jiwa penduduk perempuan, tersebar di 22 Kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Ngemplak sebanyak 101.022 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Tamansari sebanyak 29.539 jiwa.

1.3.3. Kewenangan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Urusan Pemerintahan wajib, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan diselenggarakan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f) Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a) Tenaga Kerja;
 - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c) Pangan;
 - d) Pertanahan;
 - e) Lingkungan Hidup;
 - f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i) Perhubungan;
 - j) Komunikasi dan Informatika;
 - k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - l) Penanaman Modal;
 - m) Kepemudaan dan Olahraga;
 - n) Statistik;
 - o) Persandian;
 - p) Kebudayaan;
 - q) Perpustakaan; dan
 - r) Kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
 - a) Kelautan dan Perikanan
 - b) Pariwisata;
 - c) Pertanian;
 - d) Kehutanan;
 - e) Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f) Perdagangan;
 - g) Perindustrian; dan
 - h) Transmigrasi.

1.3.4. Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat Daerah;
- 4) Dinas Daerah (20), yang terdiri dari:
 - (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (2) Dinas Kesehatan;
 - (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - (5) Dinas Sosial;
 - (6) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - (7) Dinas Ketahanan Pangan;
 - (8) Dinas Lingkungan Hidup;
 - (9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - (10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - (11) Dinas Perhubungan;
 - (12) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - (13) Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;
 - (14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - (15) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - (16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - (17) Dinas Pertanian;
 - (18) Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - (19) Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - (20) Satuan Polisi Pamong Praja.
- 5) Badan Daerah (5), yang terdiri dari:
 - (1) Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - (2) Badan Keuangan Daerah;
 - (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 6) Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari 3 (tiga) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kelas D Kabupaten Boyolali dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kelas C Kabupaten Boyolali;

- 7) Kecamatan (22), yaitu Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sambi, Kecamatan Simo, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Klego, Kecamatan Andong, Kecamatan Karanggede, Kecamatan wonosegoro, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Juwangi, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Gladagsari, dan Kecamatan Wonosamodro.
- 8) Kelurahan (6), yaitu Kelurahan Siswodipuran, Kelurahan Pulisen, Kelurahan Banaran, Kelurahan Sambeng, Kelurahan Mojosongo, dan Kelurahan Kemiri.

2. Sumber Daya Aparatur

Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber daya aparatur yang ditempatkan pada seluruh Perangkat Daerah dan Unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	39	16	55
2	SMP	65	11	76
3	SMA	408	114	522
4	Diploma I dan II	88	160	248
5	Diploma III	208	771	979
6	Diploma IV dan S1	1442	2280	3722
7	S2	218	189	407
8	S3	0	1	1
	Total	2468	3542	6010

Sumber: BKPSDM Kab. Boyolali, 2024

Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Juru Muda/I a	0	0	0
2	Juru Muda Tingkat I/I b	0	0	0
3	Juru/I c	1	0	1
4	Juru Tingkat I/I d	18	8	26
5	Pengatur Muda/II a	40	12	52
6	Pengatur Muda Tingkat I/II b	47	11	58
7	Pengatur/II c	123	92	215
8	Pengatur Tingkat I/II d	186	196	382
9	Penata Muda/III a	365	462	827
10	Penata Muda Tingkat I/III b	482	921	1403
11	Penata/III c	173	344	517
12	Penata Tingkat I/III d	458	728	1186
13	Pembina/IV a	244	341	585
14	Pembina Tingkat I/IV b	271	353	624
15	Pembina Utama Muda/IV c	57	67	124
16	Pembina Utama Madya/IV d	0	3	3
17	Pembina Utama/IV e	3	4	7
	Total	2468	3542	6010

Sumber: BKPSDM Kab. Boyolali, 2024

Tabel 1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	25	7	32
2	Jabatan Administrator	126	44	170
3	Jabatan Pengawas	179	167	346
4	Jabatan Pelaksana	731	358	1089
5	Jabatan Fungsional	1407	2966	4373
	Total	2468	3542	6010

Sumber: BKPSDM Kab. Boyolali, 2024

3. Sumber Daya Keuangan

Pembiayaan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.4 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024

a.	Pendapatan Daerah	Rp. 2.420.568.075.000,00
	- Pendapatan Asli Daerah	Rp. 525.939.277.000,00
	- Pendapatan Transfer	Rp. 1.894.628.798.000,00
	- Pendapatan lain-lain	Rp. -
b.	Belanja Daerah	Rp. 2.562.353.520.000,00
	1) Belanja Operasi	Rp. 1.761.753.566.000,00
	2) Belanja Modal	Rp. 344.584.201.000,00
	3) Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.000.000.000,00
	4) Belanja Transfer	Rp. 451.015.753.000,00
	Surplus/(Defisit)	Rp. (141.785.445.000,00)
c.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 148.785.445.000,00
d.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 7.000.000.000,00
	Sisa lebih/Kurang	-

Sumber: BKD Kab. Boyolali, 2024

1.4. Isu Strategis Daerah

Berdasarkan permasalahan Pokok Urusan Pemerintahan Kabupaten Boyolali dapat dirumuskan bahwa isu strategis Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Investasi yang Berwawasan Lingkungan;
- 2) Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan;
- 3) Pembangunan SDM yang Inklusif dan Berdaya Saing;
- 4) Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan;
- 5) Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan *Agile*;
- 6) Penanganan Bencana Alam dan Non Alam; dan
- 7) Inovasi dan Teknologi Informatika.

1.5. Prioritas dan Arah Kebijakan

Prioritas pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2024 adalah mengembalikan identitas Boyolali sebagai kota susu dan lumbung pangan mencerminkan sektor unggulan yang perlu semakin dioptimalkan. Optimalisasi sektor unggulan memiliki konsep terintegrasi dengan berbagai sektor lain. Strategi utama yang dijalankan berupa penerapan *good farming practices*, fasilitasi kebutuhan modal, pengembangan kemitraan yang sehat, pendampingan dari hulu ke hilir hingga memberi nilai tambah pasca produksi. Prioritas pembangunan dalam arah kebijakan ini antara lain:

- 1) Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan Peternakan;
- 2) Pendampingan UMKM/IKM secara berkelanjutan;
- 3) Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung industri pengolahan susu;
- 4) Peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan susu dan peningkatan kompetensi SDM pelaku agro industri susu;
- 5) Peningkatan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif;
- 6) Peningkatan pemerataan pembangunan di wilayah Boyolali Utara, terutama dalam realisasi, investasi, peningkatan daya tarik wisata, dan peningkatan kualitas infrastruktur yang menopang pusat pertumbuhan baru di wilayah Boyolali utara;
- 7) Peningkatan keberdayaan masyarakat desa melalui optimalisasi potensi/aset desa, penguatan BUMDesa dan pembangunan kawasan pedesaan;
- 8) Peningkatan keberdayaan PMKS, dengan prioritas kelompok sasar penyandang disabilitas dan rehabilitasi ODGJ; dan
- 9) Pengelolaan sampah 3R berbasis komunitas di setiap desa dan kecamatan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Kabupaten Boyolali disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjabaran latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum daerah, isu strategis, prioritas dan arah kebijakan, dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi penjelasan tentang Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Boyolali serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi pemaparan tentang pencapaian kinerja secara menyeluruh setiap tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir, antara realiasi tahun ini dengan realisasi nasional atau tertinggi nasional atau rata-rata nasional serta progres pencapaian target akhir RPJMD;

-
2. Analisis faktor pendukung keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 3. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 4. Realisasi anggaran yang digunakan dibandingkan dengan alokasi anggaran pada masing-masing tujuan strategis.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang simpulan komprehensif dari Laporan Kinerja Kabupaten Boyolali tahun 2024 beserta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.
- B. Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Boyolali Tahun 2024.
- C. Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2024.
- D. Monitoring Pencapaian Kinerja Triwulan I,II,III dan IV.
- E. Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun didasarkan pada perencanaan 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021-2026, yang memuat Visi Bupati Boyolali yaitu:

“Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi”

Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)

Dijabarkan dalam 5 (lima) Misi yaitu:

1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi Dan Berkelanjutan;
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya;
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya; dan
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri Dan Berdaya Saing.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Boyolali Tahun 2021-2026, maka ditetapkan 8 (delapan) tujuan dengan 38 (tiga puluh delapan) sasaran sebagai berikut:

- a. Tujuan 1. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya nilai investasi;
 - 2) Meningkatnya perusahaan yang ramah lingkungan;
 - 3) Meningkatnya peran perusahaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - 4) Meningkatnya pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - 5) Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian;
 - 6) Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa;
 - 7) Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian;
 - 8) Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian; dan
 - 9) Meningkatnya kenyamanan transportasi.
- b. Tujuan 2. Menurunnya tingkat kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Menurunnya pengangguran;
 - 2) Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja dan promosi lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi seluruh pekerja; dan
 - 3) Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian.
- c. Tujuan 3. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan;
 - 2) Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;

-
- 3) Meningkatnya nilai budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan;
 - 4) Meningkatnya pengendalian penduduk; dan
 - 5) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- d. Tujuan 4. Meningkatnya ketahanan sosial, dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Menurunnya resiko bencana; dan
 - 2) Meningkatnya kohesivitas sosial masyarakat.
 - e. Tujuan 5. Meningkatnya keberdayaan sosial, dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak;
 - 2) Meningkatnya kesejahteraan PMKS; dan
 - 3) Meningkatnya keberdayaan desa.
 - f. Tujuan 6. Meningkatnya kesejahteraan petani, dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian;
 - 2) Meningkatnya kualitas susu;
 - 3) Meningkatnya agro industri susu; dan
 - 4) Meningkatnya Ketahanan Pangan.
 - g. Tujuan 7. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah;
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 3) Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas keuangan daerah;
 - 4) Terwujudnya *smart governance* Boyolali; dan
 - 5) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
 - h. Tujuan 8. Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali, dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kualitas air;
 - 2) Meningkatnya kualitas udara;
 - 3) Meningkatnya kualitas tutupan lahan;
 - 4) Meningkatnya penanganan/ pengelolaan sampah
 - 5) Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis *smartness*;
 - 6) Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni; dan
 - 7) Meningkatnya kualitas bangunan dan penataan ruang.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun berdasar RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan perubahannya. Namun demikian dalam Perjanjian Kinerja terdapat perbedaan target dengan target RPJMD pada beberapa indikator kinerja. Perbedaan target tersebut disebabkan karena realisasi kinerja pada tahun sebelumnya (2023) sudah melampaui target 2024 yang ditetapkan pada RPJMD, sedangkan penentuan target didasarkan pada hasil analisa dengan memperhatikan sumber daya dan faktor lainnya.

Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	5.18 – 5.90 persen
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	7.18-5.68 persen
3	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76.31 angka
4	Meningkatnya ketahanan sosial	1 Indeks Resiko Bencana (IRB)	100.32 angka
		2 Angka Konflik Sosial	2 angka
5	Meningkatnya Keberdayaan Sosial	1 Indeks Pemberdayaan Gender	82.96 angka
		2 Angka PMKS	52.000 angka
		3 Indeks Desa Membangun	0,7555 angka
6	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	110 angka
7	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	893 angka
8	Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,60 angka
		2 Indeks smart city	3,3 angka

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kab.Boyolali 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat akuntabilitas kinerja menunjukkan derajat keterukuran kinerja Pemerintah. Akuntabilitas kinerja dituangkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, dan faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Pada bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja tujuan yang dilengkapi dengan penjelasan sasaran dan program yang mendukung, realisasi anggaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta inovasi terkait sasaran/indikator kinerja.

3.1. Pengukuran Kinerja

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas hasil (*outcome*) yang telah dilaksanakan. Indikator hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten didukung oleh kinerja Perangkat Daerah yang didukung oleh kinerja Pejabat dari tingkat tertinggi sampai pada level staf terendah. Pada awal tahun, Bupati menyusun Perjanjian Kinerja yang diikuti oleh Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, selanjutnya diturunkan pada masing-masing Pejabat dibawahnya sampai pada level Pelaksana terendah. Setiap bulan masing-masing Pegawai menyusun rencana aksi dan capaian kinerjanya melalui *aplikasi kinerja.bkn.go.id*, sebagai dasar dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai. Dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah setiap triwulan dapat dilihat melalui *monev.boyolali.go.id*.

Pengukuran capaian kinerja menggunakan rumus:

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menyimpulkan pencapaian target kinerja tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal berdasar pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Ordinal Capaian Kinerja

No	Capaian kinerja	Kategori
1.	91 % keatas	Sangat tinggi
2	76 – 90 %	Tinggi
3	66 – 75 %	Sedang
4	51 – 65 %	Rendah
5	50 % kebawah	Sangat rendah

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2024 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024, antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya (2021, 2022, dan 2023), realisasi kinerja nasional tahun 2024 dan target kinerja akhir periode RPJMD 2021-2026. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan Efisiensi pencapaian target kinerja. Berikut hasil pengukuran kinerja tahun 2024:

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/ Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Target 2024	Realisasi				Realisasi Nasional Tahun 2024
				2021	2022	2023	2024	
Tujuan 1: Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi								
1	Laju pertumbuhan ekonomi	5.68 - 6.15	5.18- 5.90	4.63	6.33	5.63	4.64	5.1
Tujuan 2: Menurunnya tingkat kemiskinan								
2	Tingkat kemiskinan	5.18 - 2.68	7.18 – 5.68	10.1 8	9.82	9.81	9.63	9.03
Tujuan 3: Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing								
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,34	76.31	74.4	74.9 7	75.41	75.96	75.02
Tujuan 4: Meningkatnya ketahanan sosial								
4	Indeks Resiko Bencana (IRB)	80,32	110.32	130. 32	130. 32	110.06	94.67	99.61 (Provinsi Jawa Tengah)
5	Angka Konflik Sosial	8	2	15	-	-	-	-
Tujuan 5: Meningkatnya keberdayaan sosial								
6	Indeks Pemberdayaan Gender	82	82.96	82.2 3	82.2 3	82.94	82.98	76.9
7	Angka PMKS	66.153	52.000	58.3 31	61.0 29	53.122	66.088	-
8	Indeks Desa Membangun	0,7553	0.7555	0.72 33	0.73 49	0.7505	0.7707	0.7034

No	Tujuan/ Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Target 2024	Realisasi				Realisasi Nasional Tahun 2024
				2021	2022	2023	2024	
Tujuan 6: Meningkatnya kesejahteraan petani								
9	Nilai Tukar Petani	109,8	110	102. 76	107. 27	117.11	112.98	122.78
Tujuan 7: Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah yang baik								
10	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	903	893	833	843	893	893	-
Tujuan 8: Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali								
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,71	66.60	63.9 3	60.7 7	61.39	65.49	73.53
12	Indeks <i>smart city</i>	3,28	3,3	3.31	3.15	3.3	3.65	3.93 (Kab/Kota tertinggi)

3.2. Analisa Pengukuran Kinerja

Berdasar Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 8 Tujuan dengan 12 Indikator, sebagai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Boyolali, sebagai berikut:

TUJUAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Tujuan 1

Indikator kinerja	Target 2024	Realisasi				Capaian 2024
		2021	2022	2023	2024	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.18-5.90%	4.63%	6.33%	5.63%	4.64%	89.58%

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1

Indikator kinerja	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2024	Progres	Realisasi Nasional	Keterangan
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.68-6.15%	4.64%	85%	5.1%	-0.46

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4.64%. Jika disandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 5.18-5.90%, maka tidak mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 89.58%

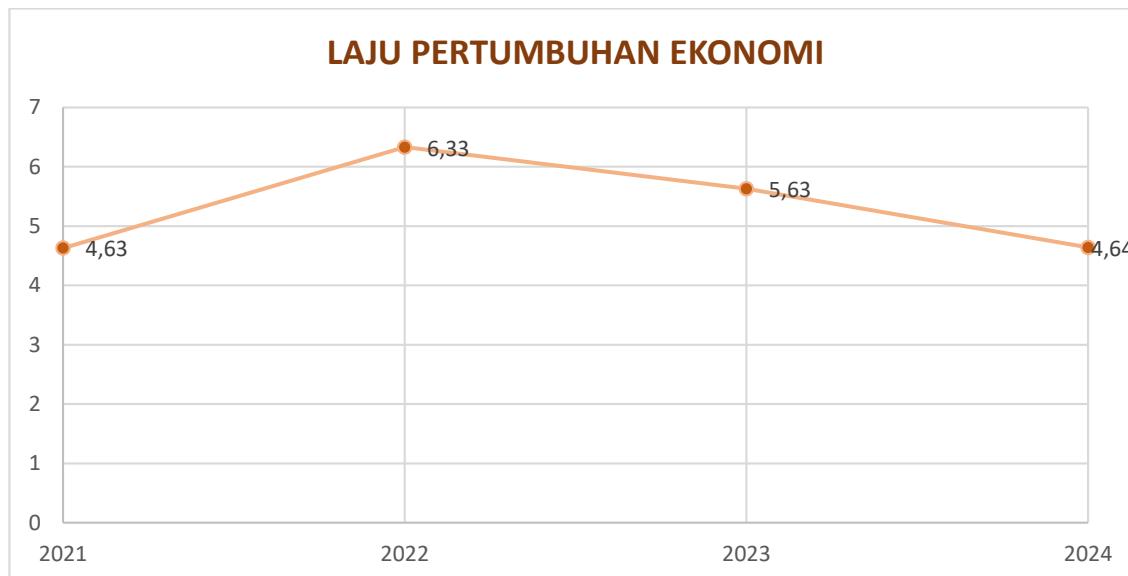
Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0.99, dimana realisasi tahun 2023 adalah sebesar 5.63%

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka laju pertumbuhan ekonomi telah mencapai 85%, dengan target akhir RPJMD sebesar 5.68 - 6.15%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan angka laju pertumbuhan ekonomi secara nasional maka Kabupaten Boyolali lebih rendah sebesar 0.46 poin dimana realisasi nasional sebesar 5.1%.

Perkembangan Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 – 2024



Pertumbuhan ekonomi adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi menggambarkan besarnya peningkatan produksi yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi ukuran keberhasilan pembangunan yang berlangsung dalam periode tertentu. Penghitungan laju pertumbuhan ekonomi menggunakan angka PDRB atas dasar harga konstan dan harga berlaku menurut lapangan usaha dari berbagai sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya. Capaian pada setiap sektor di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian PDRB Setiap Sektor Tahun 2021-2024

PDRB setiap Sektor	Tahun			
	2021	2022*)	2023**)	2024**)
pertanian, kehutanan, dan perikanan	3.45	1.29	1.47	2.99
pertambangan dan penggalian	-0.04	2.36	-0.49	2.46
Industri pengolahan	5.5	4.44	7.11	6.50
Pengadaan listrik dan gas	6.00	4.29	13.13	4.68
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2.91	1.72	7.83	4.27
Konstruksi	9.13	2.67	9.72	6.39
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	8.61	4.33	5.60	1.78
Transportasi dan pergudangan	-3.17	104.29	8.76	2.00
Penyediaan akomodasi dan makan minum	3.18	19.98	12.4	9.44

PDRB setiap Sektor	Tahun			
	2021	2022*)	2023**)	2024**)
Informasi dan komunikasi	0.49	2.22	12.55	6.48
Jasa keuangan dan asuransi	5.29	2.06	6.13	2.2
Real estate	1.72	5.53	8.42	4.19
Jasa perusahaan	3.13	6.14	8.61	9.5
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	0.99	-1.72	-0.72	3.85
Jasa pendidikan	4.42	2.62	0.33	5.15
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2.89	-1.16	-0.18	5.26
jasa lainnya	1.33	9.23	8.52	5.48

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang optimalnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1) Kurang optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian.

Kurang optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan ditandai dengan kontribusi PDRB sektor perdagangan yang berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2024 sebesar 1.78%. Angka tersebut mengalami penurunan cukup besar dari tahun 2023 sebesar 3.82. Upaya yang telah dilakukan ternyata belum cukup untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan. Pada tahun 2024 di Jawa Tengah termasuk didalamnya Kabupaten Boyolali mengalami inflasi yang sangat rendah mencapai 0,26 pada bulan November 2024, dan berada dibawah inflasi nasional. Kondisi tersebut bukan merupakan hal yang menguntungkan, karena inflasi yang rendah bisa disebabkan karena rendahnya daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan lesunya perekonomian, yang berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi.

2) Kurang optimalnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian.

Kurang optimalnya pertumbuhan sektor perindustrian ditandai dengan kontribusi PDRB sektor perindustrian yang berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perindustrian tahun 2024, sebesar 6.5%. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0.61. Upaya peningkatan yang sudah dilakukan, belum cukup untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri di Kabupaten Boyolali ini. Salah satu penyebab belum optimalnya kontribusi sektor perindustrian adalah membanjirnya impor pakaian jadi, yang menyebabkan industri lokal menjadi kalah dalam persaingan sehingga perkembangannya terhambat.

3) Kurang optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian.

Kurang optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata ditandai dengan kontribusi PDRB sektor pariwisata yang berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata tahun 2024 sebesar 9.44%. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 dengan angka sebesar 12.4%. Penurunan angka dari tahun 2023 tersebut disebabkan oleh karena peningkatan yang terlalu tinggi pada tahun 2023 akibat pencabutan aturan PPKM pada akhir tahun 2022, yang menyebabkan adanya euforia penggunaan jasa hotel maupun penyedia makan dan minum, sehingga hal tersebut tidak bisa menjadi pembanding. Upaya peningkatan pertumbuhan sektor pariwisata yang dilaksanakan belum cukup untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Boyolali ini.

2. Sedangkan faktor yang memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Boyolali adalah sebagai berikut:

1) Nilai investasi

Nilai investasi mempunyai andil besar terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan nilai investasi tersebut ditandai dengan realisasi penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri tahun 2024 yaitu sebesar Rp3.045.473.744.959,-. Mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 57%. Upaya peningkatan nilai investasi dilaksanakan melalui pengembangan budaya dan citra pro investasi dengan program promosi penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal serta pengendalian penanaman modal yang mengarah pada pendampingan percepatan realisasi investasi Promosi investasi yang focus dan efektif, Optimalisasi Potensi Investasi, Peningkatan iklim penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, Penyediaan infrastruktur ekonomi, terjalinya Kemitraan antara pemerintah, Investor menengah dengan usaha industri mikro kecil, pengendalian inflasi, Optimalisasi investasi di wilayah Utara dan penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Mal Pelayanan Publik Kabupaten Boyolali

2) Kenyamanan transportasi

Meningkatnya kenyamanan transportasi ditandai dengan kondisi jalan yang bagus dan koneksi antar wilayah yang lancar, hal tersebut akan memberi pengaruh terhadap tersambungnya sentra-sentra produktif ekonomi masyarakat, sehingga laju distribusi barang akan semakin lancar dan meningkatnya daya saing produk ekonomi dan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi jalan mantap tahun 2024 sebesar 83.93%, mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 0.07, sedangkan rasio koneksi tahun 2023 sebesar 0,51, tidak mengalami peningkatan dari tahun 2023. Upaya peningkatan kenyamanan transportasi dilaksanakan melalui peningkatan pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan dan pengembangan drainase, peningkatan ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai dan pengembangan sistem manajemen pelayanan perhubungan, dengan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), yang mengarah pada pengaktifan kembali beberapa jalur trayek angkutan umum yang sempat berhenti, penyediaan perlengkapan jalan Kabupaten, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan dan prasarana jalan, Penyediaan perlengkapan guna rekayasa lalu lintas, pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan jalan kabupaten, penyediaan dan pemasangan andalalin, penyediaan dan pengelolaan tempat parkir, pemeliharaan terminal, dan penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor.

3) Pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD

Peningkatan PAD merupakan salah satu sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya peningkatan PAD maka semakin meningkat pula sumber dana untuk pembangunan daerah. Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk peningkatan PAD menjadi salah satu strategi guna peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Boyolali. Pemanfaatan BMD ini ditargetkan meningkat setiap tahunnya, tahun 2022 pemanfaatan BMD fokus pada tanah pertanian, tahun 2023 pemanfaatan BMD bertambah pada tanah lapang, dan tahun 2024 pemanfaatan BMD bertambah pada gedung perkantoran. Semakin banyaknya BMD yang produktif, maka semakin besar pula PAD yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

4) Perusahaan yang ramah lingkungan

Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran menjadi tugas Pemerintah dan masyarakat agar lingkungan sekitar tetap terjaga dan dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu penyumbang kerusakan lingkungan dan pencemaran adalah perusahaan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Boyolali berupaya untuk meminimalisir pencemaran lingkungan dan meningkatkan persentase perusahaan yang ramah lingkungan. Saat ini sebesar 97.6% perusahaan masuk dalam kategori ramah lingkungan. Upaya untuk meminimalisir adanya pencemaran akibat pengoperasian perusahaan dilakukan dengan mendorong perusahaan untuk menaati kaidah-kaidah lingkungan dalam kegiatannya, antara lain memiliki dokumen perizinan berusaha/ persetujuan lingkungan sesuai ketentuan, memiliki IPAL pengolah air limbah dan menguji kualitas air limbahnya, melakukan uji kualitas udara sesuai peraturan perundang-undangan serta menyampaikan laporan triwulan atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Perusahaan ramah lingkungan mengedepankan kelestarian lingkungan dalam proses produksinya. Mereka secara konsisten menjaga 3K (Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan RL (Ramah Lingkungan) dalam proses produksi. Secara sederhana perusahaan ramah lingkungan dapat diartikan tidak ada permasalahan berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam pengelolaan perusahaan, yang akan memunculkan aduan lingkungan dari masyarakat. Peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan dilaksanakan melalui penguatan orientasi perusahaan yang menerapkan *green company, green strategy, green process, green product, green employee* dengan program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang mengarah pada fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan, pengawasan terhadap usaha yang telah berizin, sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH serta pemberian penghargaan kepada dunia usaha/kegiatan.

3. Adapun kendala/hambatan serta solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Masih terbatasnya pemahaman pelaku IKM tentang pentingnya sertifikasi, dan *branding*, prosedur eksport sehingga sebagian besar masih menjalankan usahanya terbatas pada perolehan penghasilan saja, tidak berorientasi pemasaran lebih luas dan eksport. Adapun untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah melaksanakan pendampingan secara berkesinambungan terhadap pelaku IKM guna peningkatan sertifikasi, branding dan eksport barang.
 - 2) Upaya meningkatkan stabilitas harga barang dan jasa terkendala saat adanya perayaan hari raya, natal atau kegiatan yang merupakan budaya lokal berupa *nyadran*. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya permintaan sehingga terjadi lonjakan harga. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah melakukan operasi pasar menjelang peringatan hari besar tersebut, sehingga kenaikan harga yang terjadi masih dalam taraf wajar dan tidak berlebihan.
 - 3) Upaya peningkatan pertumbuhan PDRB sektor industri khususnya industri sedang terkendala dengan masih terbatasnya pemahaman, kesadaran, kemauan/motivasi untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi produksi dan pemasaran yang berakibat pada kontribusi PDRB sektor industri. Adapun untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Boyolali telah melaksanakan sosialisasi, pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM.

Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi dengan capaian kinerja 122.91%, didukung dengan penganggaran sebesar Rp179.273.408.000,00 dan realisasi sebesar Rp137.828.797.935,00

dengan capaian sebesar 76.88%. Upaya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi didukung dengan 18 (delapan belas) program, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
7. Program Pengembangan Ekspor;
8. Program Standarisasi Perlindungan Konsumen;
9. Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
12. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
13. Program Penyelenggaraan Jalan;
14. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
15. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
17. Program Pemasaran Pariwisata; dan
18. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

TUJUAN 2 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Tujuan 2

Indikator kinerja	Target 2024	Realisasi				Capaian 2024
		2021	2022	2023	2024	
Tingkat kemiskinan	7.18-5.68%	10.62%	9.82%	9.81%	9.63%	65.88%

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2

Indikator kinerja	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2024	Progres	Realisasi Nasional	Keterangan
Tingkat kemiskinan	5.18 - 2.68%	9.63%	11%	9.03%	+0.6

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tingkat kemiskinan tahun 2024 sebesar 65.88% dari target sebesar 7.18-5.68%, terealisasi sebesar 9,63%.

Angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0.18 poin, dimana tingkat kemiskinan tahun 2023 tercatat sebesar 9.81. Meskipun angka kemiskinan

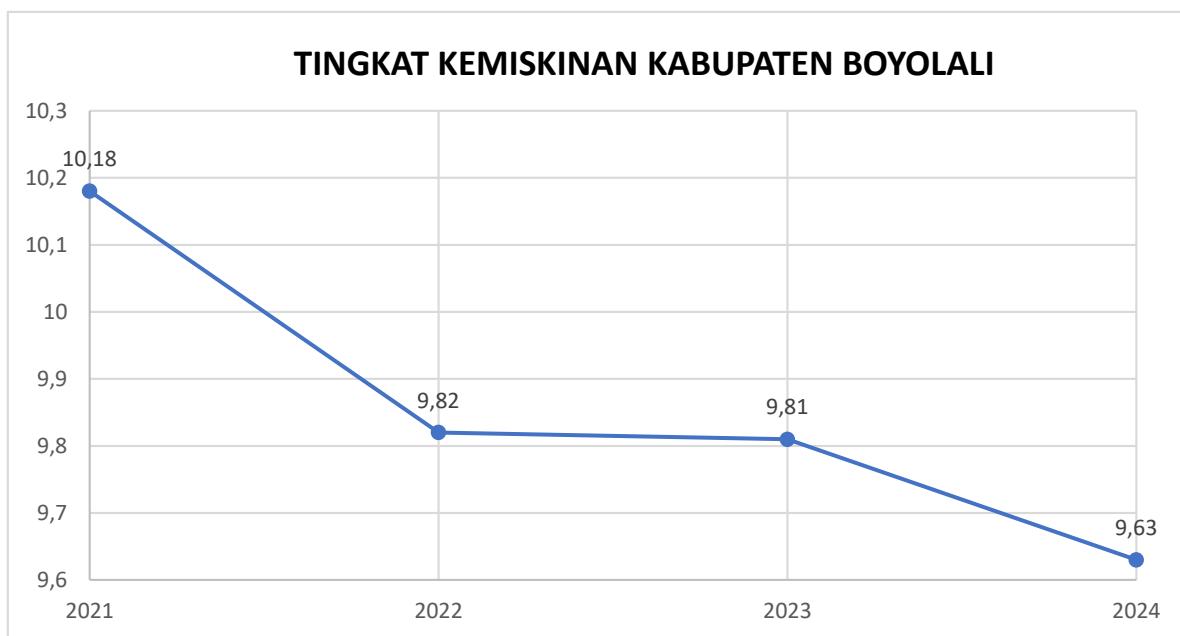
mengalami penurunan yang cukup baik, namun hal tersebut tidak mampu untuk mencapai target tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka upaya penurunan tingkat kemiskinan di Boyolali baru mengalami progres sebesar 11% dari data awal tahun 2020 sebesar 10.18%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional maka Kabupaten Boyolali lebih tinggi 0.6 poin dari angka kemiskinan nasional dimana angka kemiskinan nasional 2024 tercatat sebesar 9.06%.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Boyolali 2021 - 2024



1. Analisa faktor penyebab belum optimalnya upaya dalam penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya penurunan pengangguran.

Pengangguran merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan, karena tidak adanya penghasilan yang mencukupi menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga disebut sebagai miskin. Menurunnya pengangguran ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 sebesar 3.16%, mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0.89, dimana tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 tercatat sebesar 4.05%. Penurunan pengangguran sebesar 0.89 tersebut belum mampu memberikan kontribusi optimal dalam penurunan angka kemiskinan di Boyolali. Upaya yang telah dilakukan dalam Penurunan tingkat pengangguran adalah melalui peningkatan kesempatan kerja dengan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, yang diarahkan pada pelaksanaan pelatihan bagi pencari kerja, penyediaan informasi lowongan kerja, dan membangun perjanjian kerja sama agar memberi prioritas kepada tenaga kerja lokal (Kabupaten Boyolali).

-
- 2) Belum optimalnya kontribusi dan pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian.

Sektor koperasi dan usaha kecil menengah memberi kontribusi yang besar pula terhadap menurunnya angka kemiskinan. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas dasar kekeluargaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, sedangkan UMKM adalah merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat di sekitarnya untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Dari pengertian tersebut sudah dapat dipastikan bahwa koperasi dan UMKM memberikan kemudahan kepada masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang berarti pula menurunkan tingkat kemiskinan. Kesehatan koperasi salah satunya ditandai dengan adanya peningkatan SHU setiap tahunnya. Persentase koperasi yang SHUnya meningkat tahun 2024 sebesar 62.60%, meningkat sebesar 18%, dimana realisasi tahun 2023 sebesar 53. Sedangkan kemajuan usaha mikro ditandai dengan peningkatan omzet setiap tahunnya. Jumlah usaha mikro yang meningkat omzetnya tahun 2024 sebesar 66, meningkat sebesar 1% dari tahun 2023, dimana realisasi tahun 2023 sebesar 65. Peningkatan kesehatan koperasi dan peningkatan omzet usaha mikro tersebut belum mampu memberikan kontribusi optimal dalam penurunan angka kemiskinan di Boyolali. Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kontribusi dan pertumbuhan sektor koperasi dan UMKM terhadap perekonomian dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pengurus koperasi, peningkatan kualitas pengelolaan koperasi, peningkatan kapasitas SDM pelaku pelaku UMKM, peningkatan standarisasi produk UKM, peningkatan akses permodalan dengan program pendidikan dan pelatihan perkoperasian, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pengembangan UMKM, pemberdayaan UMKM, yang diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan, pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi, pelatihan pelaku usaha mikro, pemberdayaan kemitraan usaha mikro, dan pendampingan terhadap usaha mikro.

Upaya penurunan angka kemiskinan juga dilaksanakan tidak hanya secara cascading tetapi juga melalui crosscutting program yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah yaitu: Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta berkolaborasi dengan pihak swasta, Pemerintah Desa, dan Baznas. Crosscutting program tersebut dilakukan melalui program pengelolaan pendidikan, pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, pengelolaan sistem penyediaan air minum, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum, rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, administrasi Pemerintahan Desa, Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, serta perencanaan dan pembangunan industri.

2. Adapun kendala/hambatan serta solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- Data angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tidak dapat memberikan gambaran riil mengenai nama dan alamat penduduk yang dianggap
-

miskin, sehingga menyebabkan adanya salah sasaran dalam intervensi penanganan kemiskinan. Atas hambatan tersebut Pemerintah Kabupaten Boyolali melakukan pemberahan data kemiskinan yang berbasis RT, dengan harapan data yang diperoleh lebih jelas identitas warga miskin dimaksud sehingga memudahkan dalam penanganannya. Selain itu dibentuk komunitas tanggap sosial yang bertugas menangani segala permasalahan sosial dengan cepat dan tanggap.

Penurunan tingkat kemiskinan didukung dengan penganggaran sebesar Rp1.279.364.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.255.434.080,00 dengan capaian sebesar 98,36%. Adapun dalam pencapaian target tujuan kedua ini didukung dengan 6 (enam) program, sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Hubungan Industrial;
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
5. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian; dan
6. Program Pengembangan UMKM.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

TUJUAN 3 : Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Tujuan 3

Indikator kinerja utama	Target 2024	Realisasi				Capaian 2024
		2021	2022	2023	2024	
Indeks Pembangunan Manusia	76.31%	74.4%	74.97%	75.41%	75.96%	99.54%

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 3

Indikator kinerja utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2024	Progres	Realisasi Nasional	Keterangan
Indeks Pembangunan Manusia	77.34%	75.96%	55%	75.02	+0.94

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 sebesar 99.54% dari target sebesar 76.31% terealisasi sebesar 75.96%.

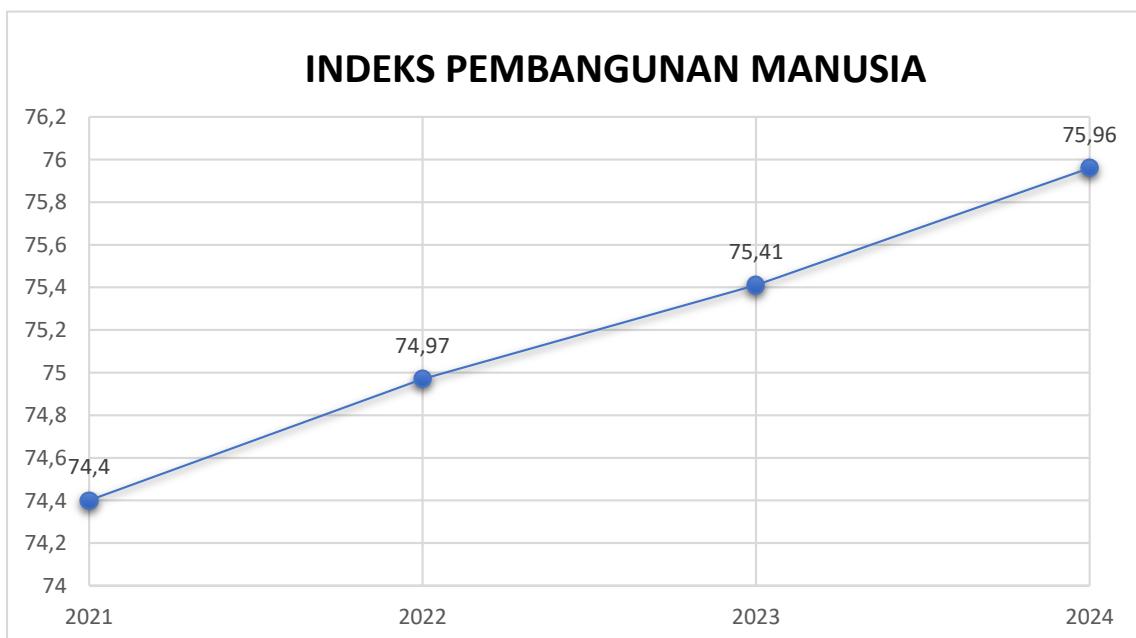
Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 0.55 poin, dimana indeks pembangunan manusia tahun 2023 tercatat sebesar 75.41%.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka upaya peningkatan indeks pembangunan manusia di Boyolali telah mengalami progres sebesar 55% dari baseline awal tahun 2020 dimana indeks pembangunan manusia berada pada angka 74.25%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks pembangunan manusia secara nasional maka indeks pembangunan manusia Kabupaten Boyolali lebih tinggi sebesar 0.94 poin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3 Perkembangan IPM Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Boyolali

Berdasarkan rumusan dari *United Nations Development Programme* (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang meliputi 3 (tiga) dimensi, yaitu:

- 1) Umur panjang dan hidup sehat, yang diukur dalam angka harapan hidup
Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun, sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun karena sistem registrasi di Indonesia yang belum berjalan baik, maka penghitungan dilakukan secara tidak langsung melalui data hasil sessus atau survei kependudukan.
- 2) Pengetahuan, yang diukur melalui: harapan lama sekolah (HLS), dan rata-rata lama Sekolah (RLS)
Harapan lama Sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui

kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian.

Sedangkan rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun keatas, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

- 3) Standar hidup layak, yang diukur melalui pengeluaran perkapita
Pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut maka capaian komponen IPM Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Capaian Komponen IPM Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2024

Komponen IPM	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	76.03	76.12	76.23	76.44
Harapan Lama Sekolah	12.57	12.62	12.66	12.67
Rata-rata Lama Sekolah	7.85	8.08	8.09	8.17
Pengeluaran perkapita Disesuaikan	13.031	13.250	13.716	14.195

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali

1. Analisa faktor penyebab kurang optimalnya peningkatan Indeks pembangunan Manusia di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:
 - 1) Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah dan usia rata-rata lama sekolah secara bertahap dan terus menerus setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut belum optimal dalam memberikan kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, dengan program pengelolaan pendidikan dan program pendidik dan tenaga kependidikan, yang diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan gedung, penyediaan sarana prasarana pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dan evaluasinya, pemberian beasiswa, pelaksanaan lomba siswa, pemerataan tenaga pendidik, pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah sesuai dengan SNP, fasilitasi penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan, penyediaan sarana baca melalui pelayanan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling.
 - 2) Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tingkat derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari angka harapan hidup. usia harapan hidup secara bertahap dan terus menerus memang mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut belum optimal dalam memberikan kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan bayi, peningkatan penanganan gizi buruk dan *stunting*, peningkatan penanganan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, dengan program pemenuhan upaya kesehatan

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, yang diarahkan pada fasilitasi pemenuhan fasilitas kesehatan sesuai standart, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan menyusui, penyelenggaraan pelayanan kesehatan bayi dan balita, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis, kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV, penderita hipertensi, diabetes militus, orang dengan gangguan jiwa, pengelolaan *surveillans* kesehatan, pengelolaan kesehatan bagi penduduk pada kondisi luar biasa, Pelayanan kesehatan pada usia dasar, usia produktif, dan usia lanjut, penyelenggaraan kabupaten sehat, pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM kesehatan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik *higiene* sanitasi tempat pengelolaan makanan, pelaksanaan posyandu, pembinaan kesehatan masyarakat melalui gerakan masyarakat (Germas).

- 3) Belum optimalnya pengeluaran perkapita masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka peningkatan pengeluaran perkapita adalah dengan pengendalian jumlah penduduk. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang luas akan menjadi salah satu penyebab rendahnya perkapita. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, angka kelahiran kasar tahun 2024 sebesar 2.09 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0.06. Penurunan kelahiran kasar tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pengeluaran perkapita, namun hal tersebut belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Upaya pengendalian penduduk telah dilaksanakan melalui peningkatan penyelenggaraan keluarga berencana, dengan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, pembinaan Keluarga Berencana, pengendalian penduduk, yang diarahkan pada upaya peningkatan kepesertaan penggunaan kontrasepsi, penyediaan alat kontrasepsi pada fasilitas kesehatan, peningkatan kepesertaan KB pria, pemberian sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- 4) Belum optimalnya peningkatan nilai budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan. Peningkatan nilai budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan secara tidak langsung akan memberi pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas manusia. Adanya pengenalan terhadap budaya lokal dan nilai-nilai religius diharapkan meningkatkan kualitas masyarakat yang akan berpengaruh pada pola pikir dan cara bertindak sehingga setiap perbuatan yang dilakukan telah melalui pemikiran dan pertimbangan yang baik. Budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya tersebut dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir atau hukum adat. Peningkatan dan pelestarian budaya lokal sangat diperlukan dalam upaya menunjukkan identitas dan sebagai katalisator dalam pembangunan. Memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan budaya lokal dalam pembangunan akan menimbulkan banyak permasalahan kedepannya, namun jika kita meningkatkan dan memanfaatkan budaya lokal yang sudah ada, maka

pembangunan akan lebih mudah dan bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat. Peningkatan nilai budaya lokal dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan kekayaan budaya dan nilai religius, Peningkatan pengelolaan permuseuman, dengan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, pengembangan kesenian tradisional, pengelolaan permuseuman, dan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, yang diarahkan pada pelestarian cagar budaya, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kesenian, pelaksanaan gelar seni budaya, pengelolaan museum, fasilitasi kegiatan keagamaan, dan pemberian bantuan bidang keagamaan.

- 5) Belum optimalnya peningkatan kontribusi pemuda dalam pembangunan.

Pemuda merupakan salah satu aset yang berperan sebagai subyek pembangunan. Adanya peran aktif pemuda dalam pembangunan menunjukkan bahwa kualitas pemuda dalam hal ini sebagai sumber daya manusia adalah baik, sehingga memberi kontribusi terhadap perhitungan indeks pembangunan manusia. Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan di Boyolali dapat dilaksanakan melalui pemerataan fasilitas olahraga, pembinaan klub olahraga, pengembangan organisasi kepemudaan, peningkatan kualitas organisasi kepramukaan, peningkatan olahraga rekreasi, peningkatan prestasi olahraga, dengan program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, pengembangan kapasitas kepramukaan, yang diarahkan pada penyediaan sarana prasarana olahraga, pelatihan bagi pelatih, keikutsertaan event olahraga, pemberian penghargaan pada atlet dan pelatih berprestasi, peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dan kepramukaan.

2. Adapun kendala/hambatan serta solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih ditemukan adanya siswa yang putus sekolah meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, atas permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pendekatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepada keluarga siswa putus sekolah. Menelusuri penyebabnya dan menyelesaiakannya sehingga angka putus sekolah bisa ditekan. Selain itu bagi warga yang putus sekolah dalam hal ini tidak memiliki ijazah tingkat dasar, maka dilakukan pendekatan melalui pendidikan luar sekolah, guna memberikan pengetahuan dan ketrampilan dan mendapatkan ijazah program penyetaraan baik paket A, B maupun C.
- 2) Masih tingginya kasus balita dengan gizi buruk yang mempengaruhi angka harapan hidup, atas kendala tersebut maka dalam rangka peningkatan gizi bagi balita Dinas Kesehatan melalui Puskesmas bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan kader dalam pemantauan, pendampingan, pemberian makanan tambahan, serta pemberian edukasi tentang pemberian makanan yang memenuhi gizi seimbang bagi anak.
- 3) Masih belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan, guna mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada pemuda-pemuda melalui pengarahan atau sosialisasi, peningkatan ketrampilan, peningkatan kepekaan terhadap kondisi lingkungan, dan memanfaatkan peluang dengan kreativitas dan menciptakan sesuatu yang inovatif.
- 4) Terbatasnya fasilitas yang disediakan pemerintah sehingga masyarakat tidak mengetahui budaya daerahnya sendiri, kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya melestarikan budaya, dan kurangnya minat untuk mempelajari dan mengenal budaya daerah lebih mendalam. Atas permasalahan tersebut dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan

budaya lokal, mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya dan menghidupkan kembali budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal perlu dikembangkan dan di-pertahankan dalam masyarakat karena yang paling utama adalah kearifan lokal itu sendiri mempunyai tujuan untuk mengambil sikap peduli kepada alam sekitar, kepada masyarakat, dan kodisi fisik lingkungan.

Peningkatan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing dengan capaian kinerja 99.54% didukung dengan penganggaran sebesar Rp661.222.315.343,00 dan realisasi sebesar RP631.305.299.744,00 dengan capaian sebesar 95.48%. Adapun dalam pencapaian target tujuan ketiga ini didukung dengan 16 (enam belas) program, sebagai berikut:

1. Program pengelolaan pendidikan;
2. Program pendidikan dan tenaga kependidikan;
3. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga kesehatan;
5. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
6. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
7. Program pembinaan perpustakaan;
8. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
9. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
10. Program pengembangan kapasitas kepramukaan;
11. Program pengembangan kesenian tradisional;
12. Program pelestarian cagar budaya;
13. Program pengelolaan permuseuman;
14. Program keluarga berencana;
15. Program pengendalian penduduk; dan
16. Program pembinaan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

TUJUAN 4 : Meningkatnya Ketahanan Sosial

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4

Indikator kinerja utama	Target 2024	Realisasi				Capaian 2024
		2021	2022	2023	2024	
Indeks Resiko Bencana	100.32	130.32	130.32	110.06	94.67	105.63%
Angka Konflik Sosial	2	15	0	0	0	200%

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4

Indikator kinerja utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2024	Progres	Realisasi Jawa Tengah	Keterangan
Indeks Resiko Bencana	80.32	94.67	71%	99.61	-4.94
Angka Konflik Sosial	8	0	180%	-	

1. Indeks Resiko Bencana

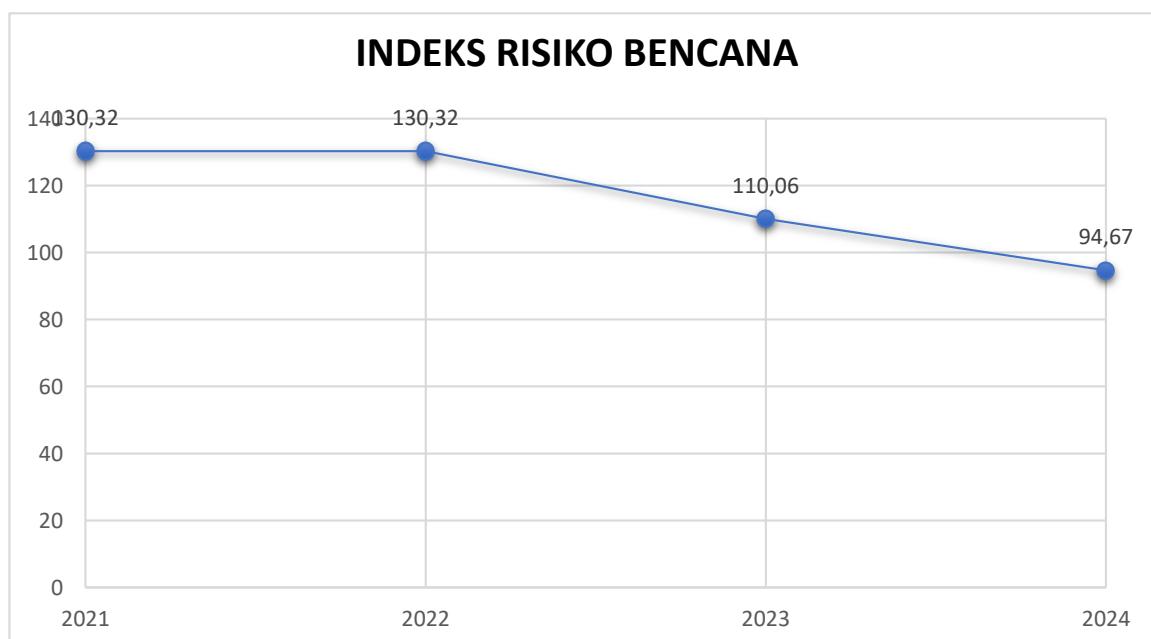
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks resiko bencana tahun 2024, sebesar 94.67, jika dibandingkan dengan target 2023 sebesar 100.06 maka angka tersebut lebih rendah atau lebih baik dengan capaian sebesar 100.24%

Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 15.39 dari tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka indeks resiko bencana di Boyolali telah mengalami pergerakan sebesar 71% dari data dasar 2020.

Sedangkan jika dibandingkan dengan indek resiko bencana Provinsi Jawa Tengah, maka Indeks Resiko Bencana Kabupaten Boyolali lebih rendah yaitu sebesar 4.94 dibawah Indeks Risiko bencana Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 99.61

Indeks resiko bencana di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.4 Indeks Resiko Bencana 2021-2024



Unsur yang paling berperan dalam penurunan indeks resiko bencana di Kabupaten Boyolali adalah menurunnya resiko bencana. Indeks resiko bencana ditentukan berdasarkan 3 (tiga) hal yaitu:

- *Hazard* (bahaya) yang dihitung berdasarkan probabilita spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi dan lainnya.
- *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan;
- *Capacity* (kapasitas) dinilai menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:
 - Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
 - Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
 - Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
 - Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
 - Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
 - Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
 - Pengembangan sistem pemulihan bencana.

1) Analisa faktor keberhasilan penurunan indeks risiko bencana

Berdasarkan tiga unsur dalam penilaian indeks risiko bencana, maka rincian komponen perhitungan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Boyolali masuk dalam kategori tinggi dan sedang dalam perhitungan bahaya (*hazard*). Keadaan bahaya dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah, sehingga kemungkinan penurunan pada unsur tersebut sangat kecil. Upaya yang mungkin bisa diusahakan untuk penurunan indeks risiko bencana adalah dengan cara penurunan angka kerentanan (*vulnerability*) dan peningkatan indeks kapasitas Daerah (*capacity*). Berdasarkan hasil evaluasi dari Badan penanggulangan Bencana Nasional, indeks kapasitas Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2024 sebesar 0.87, mengalami peningkatan sebesar 6% dari tahun sebelumnya, dimana indeks kapasitas Daerah tahun 2023 sebesar 0.82. Upaya peningkatan indeks tersebut dilaksanakan melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan pengembangan sistem pemulihan bencana.

Dalam rangka upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui program penanggulangan bencana, yang diarahkan pada penyusunan dokumen kajian resiko bencana, sosialisasi, informasi dan edukasi rawan bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana, pelaksanaan penanggulangan bencana, penanganan pasca bencana, Pelatihan Tim penanggulangan bencana, penyaluran logistik bagi korban bencana, membangun kemitraan dalam penanggulangan bencana, dan monev penanggulangan bencana.

2) Adapun kendala/hambatan serta solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Terbatasnya kapasitas SDM penanganan bencana dan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, Atas kendala tersebut maka dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM penanganan bencana, pelaksanaan sosialisasi, komunikasi dan informasi terkait kebencanaan dan budaya sadar bencana kepada masyarakat, koordinasi dengan dinas terkait dalam perbaikan infrastruktur guna menunjang program penanggulangan bencana.

2. Angka Konflik Sosial

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat konflik sosial pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi keamanan di Kabupaten Boyolali cukup baik.

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, Kabupaten Boyolali berhasil mengendalikan permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik sosial.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD dengan perkiraan angka konflik sosial sebesar 8, maka realisasi tahun 2024 sudah melampaunya.

Angka konflik sosial di Kabupaten Boyolali tidak dapat disandingkan dengan angka konflik sosial secara nasional, karena perbedaan luas wilayah dan kondisi keamanan yang berbeda pada masing-masing daerah di Indonesia.

Angka konflik sosial di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.5 Angka Konflik Sosial 2021-2024



- 1) Analisa faktor penyebab keberhasilan dalam penurunan angka konflik sosial di Kabupaten Boyolali.

Keberhasilan mencegah terjadinya konflik sosial dilakukan dengan meningkatkan kohesivitas sosial masyarakat yang ditandai dengan adanya penurunan angka potensi konflik sosial. Kohesivitas sosial masyarakat merupakan proses kesatuan, kelekatan atau daya tarik individu di masyarakat dalam rangka pemenuhan tujuan dan motivasi untuk bersama di dalamnya yang memiliki tingkat ketertarikan dan keyakinan untuk bersama dalam keberhasilan bersama, dimana didalamnya adanya rasa saling menyukai, membantu, dan secara bersama-sama saling mendukung dalam mencapai satu tujuan. Kohesivitas akan meningkatkan produktivitas, konformitas terhadap norma di masyarakat, memperbaiki semangat dan kepuasan, mempermudah komunikasi, mengurangi permusuhan, meningkatkan rasa aman dan harga diri. Dari pengertian tersebut dapat disampaikan bahwa meningkatnya kohesivitas sosial masyarakat akan meningkatkan kepedulian

antar sesama, saling menghormati dan menghargai, sehingga mengurangi adanya gesekan kepentingan yang memicu adanya potensi konflik yang berujung pada konflik di masyarakat. Angka potensi konflik tahun 2023 tahun 2024 sebesar 0, menunjukkan penurunan dari tahun 2022 yaitu sebesar 3 potensi konflik.

Upaya penurunan angka potensi konflik di Boyolali dilaksanakan melalui peningkatan deteksi dini gangguan stabilitas wilayah dengan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial, penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, Peningkatan peran partai politik dan Lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, dan pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, yang diarahkan pada Pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta penanganan konflik, fasilitasi kerukunan umat beragama, sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan, pelaksanaan patroli keamanan, penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Pelatihan tenaga pengamanan, membangun kemitraan dalam pencegahan dan penanganan, pelayanan pemadaman kebakaran, penyediaan sarana prasarana penanganan kebakaran, dan peningkatan kualitas tenaga pemadam kebakaran.

- 2) Adapun kendala/hambatan serta solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Kurang bijaknya masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi menyebabkan adanya penurunan nilai moral maupun agama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menimbulkan adanya ketidaksepahaman, yang berujung pada saling ujar kebencian yang menyebabkan adanya potensi konflik antar warga. Atas kendala tersebut Pemerintah berupaya menggugah kesadaran masyarakat dengan cara mengedukasi dan sosialisasi tentang permasalahan yang memungkinkan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat kepada anak sekolah dan masyarakat.

Peningkatan ketahanan sosial dengan capaian kinerja 105.63% dan 200%, dengan rata-rata 152.82% didukung dengan penganggaran sebesar Rp49.730.469.500,00 dan realisasi sebesar Rp49.562.814.094,00 dengan capaian sebesar 99.66%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 0.34%. Adapun dalam pencapaian target tujuan keempat ini didukung dengan 8 (delapan) program, sebagai berikut:

1. Program penanggulangan bencana;
2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Program pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
4. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
5. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
6. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
7. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; dan
8. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

TUJUAN 5 : Meningkatnya Keberdayaan Sosial

Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja Tujuan 5

Indikator kinerja utama	Target 2024	Realisasi				Capaian 2024
		2021	2022	2023	2024	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	82.96	82.23	82.23	82.94	82.98	100.02%
Angka PMKS	52.000	58.331	61.029	53.122	48.840	106.08%
Indeks Desa Membangun (IDM)	0.7555	0.7233	0.7349	0.7505	0.7707	102.01%

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 5

Indikator kinerja utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2024	Progres	Realisasi Nasional	Keterangan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	82	82.98	Terlampaui	76.9	+6.08
Angka PMKS	66.153	48.840	Terlampaui	-	-
Indeks Desa Membangun (IDM)	0.7553	0.7707	Terlampaui	0.7034	+0.0673

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2024 sebesar 82.98, jika disandingkan dengan target tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 102.01% dari target sebesar 82.96 terealisasi sebesar 82.98

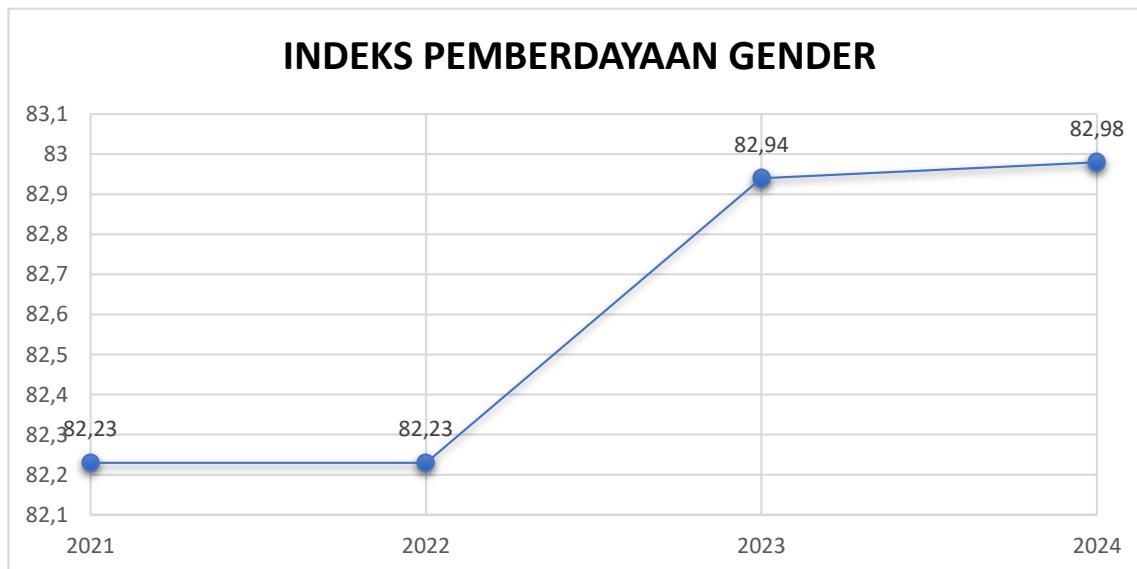
Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 0.04 poin, dimana Indeks pemberdayaan gender tahun 2023 tercatat sebesar 82.94.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka upaya meningkatkan indeks pemberdayaan gender di Boyolali telah melampaui target akhir RPJMD, namun demikian target tahunan akan selalu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga target akhir RPJMD pun akan berubah.

Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks pemberdayaan gender secara nasional maka Kabupaten Boyolali masih lebih baik yaitu sebesar 6.08 dimana indeks pemberdayaan gender secara nasional nasional sebesar 76.9.

Indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.6 Indeks Pemberdayaan Perempuan 2021-2024



Berdasarkan rumusan dari Badan Pusat Statistik, Indeks Pemberdayaan Gender bertujuan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam rangka mengukur hal tersebut maka BPS menghitung angka IDG dengan melihat partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, partisipasi aktif perempuan pada kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di perlemen, serta partisipasi aktif perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi. Berdasarkan rumusan BPS tersebut maka capaian komponen Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Capaian Komponen IDG Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2024

Komponen IDG	Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Keterlibatan di Parlemen	31.11	31.11	31.11	31.11
Sumbangan Pendapatan	40.97	41.70	41.70	41.66
Tenaga profesional	48.58	54.53	54.53	49.22

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali

Keberhasilan peningkatan nilai IDG Kabupaten Boyolali diperoleh melalui upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan
Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2024 sebesar 65.85, sementara tahun 2023 sebesar 63.99, sehingga terdapat peningkatan sebesar 1.86. Upaya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dilaksanakan melalui peningkatan pengaruhamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan akses perempuan dalam dunia politik, dan peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi, dengan program Pengarusutamaan

Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang diarahkan pada koordinasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender, sosialisasi dan pelatihan personil pada perangkat daerah dalam penyusunan PPRG untuk ARG, sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang swasta, politik, hukum, sosial dan ekonomi.

2) Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan

Angka kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 sebesar 19 kasus, sementara tahun 2023 sebesar 22 kasus, sehingga tahun 2024 ini mengalami penurunan angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 3 kasus. Hal tersebut memberi pengaruh positif terhadap upaya peningkatan keberdayaan perempuan yang berdampak pada peningkatan indeks pemberdayaan gender. Upaya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dilaksanakan melalui peningkatan perlindungan terhadap perempuan, dengan program perlindungan perempuan, yang diarahkan pada pelaksanaan sosialisasi program pencegahan kekerasan, pelayanan bagi korban kekerasan, dan peningkatan kapasitas penyedia layanan perlindungan perempuan.

3) Meningkatkan status kabupaten layak anak

Status Kabupaten layak anak tidak secara langsung mempengaruhi peningkatan indeks pemberdayaan perempuan. Status kabupaten layak anak Nindya telah diperoleh sejak tahun 2023. Dengan status tersebut maka pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Boyolali sudah lebih baik, sehingga perempuan dalam hal ini adalah ibu menjadi lebih tenang dan fokus melaksanakan aktivitasnya sebagai seorang ibu maupun sebagai pekerja/pegawai. Upaya mempertahankan status kabupaten layak anak dari Nindya dilaksanakan melalui peningkatan pemenuhan hak anak, dan peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, dengan program pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah maupun dunia usaha, koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak, pendampingan pencegahan kekerasan anak, dan mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

2. Angka PMKS

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Angka PMKS tahun 2024 sebesar 48.840, jauh lebih rendah dari yang diperkirakan yaitu sebesar 52.000 sehingga capaiannya sebesar 106.08%

Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 8.74% dari tahun 2023, dimana Angka PMKS tahun 2023 tercatat sebesar 53.122.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 66.153, maka upaya menurunkan Angka PMKS di Boyolali telah melampaui target tersebut. Target akhir RPJMD akan diubah secara bertahap setiap tahunnya dalam Perjanjian Kinerja.

Angka PMKS Boyolali tidak dapat disandingkan dengan angka PMKS secara nasional karena perbedaan jumlah penduduk dan kemampuan perekonomian yang berbeda antar wilayah di Indonesia.

Angka PMKS di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada grafik:

Grafik 3.7 Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 - 2024



Analisa faktor keberhasilan dalam penurunan angka PMKS adalah dengan meningkatkan kesejahteraan PMKS yang ditandai dengan peningkatan keberdayaan PMKS. Peningkatan keberdayaan PMKS tersebut di Kabupaten Boyolali dilaksanakan dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi PMKS, peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS, peningkatan perlindungan sosial korban bencana alam dan non alam, dengan program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, yang diarahkan pada penyediaan makanan dan pakaian serta pemberian bimbingan sosial dan pelatihan bagi PMKS, penyediaan makanan dan pakaian serta pelaksanaan rehabilitasi sosial di rumah singgah, pemberian bantuan kebutuhan pokok, bantuan alat, pembinaan dan pelatihan bagi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB), pemberian bantuan sosial kepada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, penyediaan makan, pakaian, dan layanan psikologi bagi korban bencana, peningkatan kompetensi Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna dan Penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.

Upaya penanganan PMKS juga dilaksanakan secara bersama-sama lintas Instansi melalui Tim Tanggap Bencana yang diketuai oleh Bupati Boyolali dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah tertentu, Direktur RSUD, Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Polisi Sektor, dan Kepala Baznas. Tim Tanggap sosial tersebut bertugas merumuskan kebijakan, menentukan mekanisme koordinasi, menyusun program kerja PMKS dan melaksanakan program kerja tersebut secara terpadu dan terkoordinasi. Tim tersebut juga melaksanakan penanganan secara cepat terhadap peristiwa yang terjadi baik berupa penanganan bencana, pemberian bantuan, dan penanganan kedaruratan.

3. Indeks Desa Membangun

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks desa membangun tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 102,01% dari target sebesar 0.7555 terealisasi sebesar 0.7707.

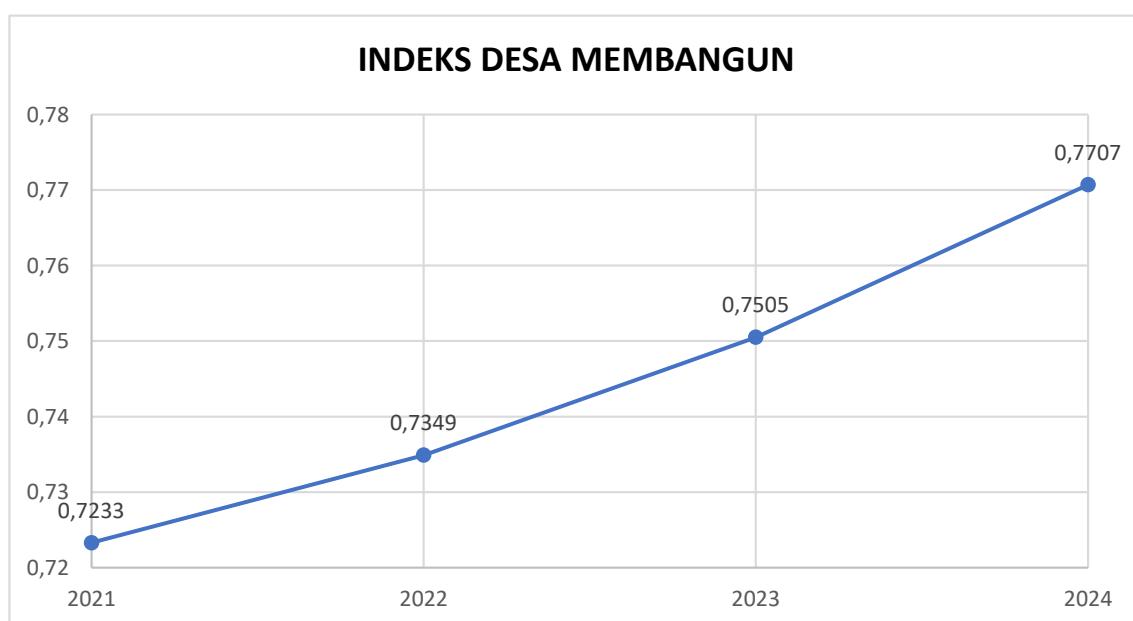
Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 0.0202 poin atau 2.7%, dimana Indeks desa membangun tahun 2023 tercatat sebesar 0.7505

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 0.7553, maka upaya meningkatkan Indeks desa membangun di Boyolali telah mengalami pergerakan sebesar 125.16% dari data awal tahun 2020 sebesar 0.7233 dan telah melampaui target akhir RPJMD 2026

Sedangkan jika dibandingkan dengan rata-rata Indeks desa membangun secara nasional maka Kabupaten Boyolali masih lebih baik yaitu sebesar 0.0673 poin atau sebesar 8.7%, dimana rata-rata secara nasional sebesar 0.7034

Indeks desa membangun di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.8 Perkembangan Indeks Desa Membangun 2021-2024



Faktor penunjang keberhasilan dalam peningkatan indeks desa membangun adalah dengan meningkatkan keberdayaan desa yang ditandai dengan kenaikan status desa baik dari berkembang menuju maju, atau dari maju menuju mandiri. Di Kabupaten Boyolali terdapat 261 Desa dengan status desa berkembang sebanyak 41 desa, desa maju sebanyak 156 desa dan desa mandiri sebanyak 64 desa. Desa yang mengalami kenaikan status desa dari berkembang menjadi maju sebanyak 23 Desa dan dari maju menjadi mandiri sebanyak 36 Desa, sedangkan untuk desa sangat tertinggal dan tertinggal sudah tidak ditemukan lagi di Kabupaten Boyolali.

Adapun kendala atau permasalahan yang ditemui dalam upaya peningkatan keberdayaan sosial, diantaranya:

1. Keterbatasan kualitas SDM perempuan;
2. Keterbatasan kapasitas panti sosial atau rumah singgah penampungan PMKS; dan
3. Adanya kekhawatiran Pemerintah Desa akan tidak adanya bantuan dari Pemerintah Pusat jika terdapat kenaikan status Desa

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM perempuan melalui sosialisasi dan pelatihan keterampilan
2. Menambah 1 lokal ruang pelayanan sosial
3. Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pentingnya kenaikan status Desa

Peningkatan keberdayaan sosial dengan capaian kinerja sebesar 102.7%, didukung dengan penganggaran sebesar Rp8.854.810.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.671.976.850,00 dengan capaian sebesar 97.94%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 2.06%. Peningkatan keberdayaan sosial didukung dengan 9 (sembilan) program, sebagai berikut:

1. Program perlindungan perempuan;
2. Program pemenuhan hak anak;
3. Program perlindungan khusus anak;
4. Program pemberdayaan sosial;
5. Program rehabilitasi sosial;
6. Program perlindungan dan jaminan sosial;
7. Program penanganan bencana;
8. Program pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
9. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

TUJUAN 6 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Tujuan 6

Indikator kinerja utama	Target 2024	Realisasi				Capaian 2024
		2021	2022	2023	2024	
Nilai Tukar Petani	110	102.76	107.27	117.11	112.98	102.71%

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6

Indikator kinerja utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2024	Progres	Realisasi Nasional	Keterangan
Nilai Tukar Petani	109.8	112.98	201.92%	122.78	- 9.8

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian nilai tukar petani akhir tahun 2024 sebesar 102.71% dari target sebesar 110 terealisasi sebesar 112.98

Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 4.13 angka, dimana nilai tukar petani tahun 2023 tercatat sebesar 117.11.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka capaian tersebut telah melampaui target akhir RPJMD. Target akhir RPJMD akan diubah secara periodik setiap tahun dalam dokumen perjanjian kinerja atau perjanjian kinerja perubahan.

Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai tukar petani secara nasional maka Kabupaten Boyolali tertinggal sebesar 9.8 angka, dimana Nilai Tukar Petani secara nasional sebesar 122.78

Nilai Tukar Petani di Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.9 Nilai Tukar Petani Kabupaten Boyolali 2021- 2024



Nilai tukar petani (NTP) menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli petani terhadap produk yang dibeli/bayar petani yaitu produk/barang konsumsi dan input produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai tukar petani semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi tersebut dan berarti secara relatif petani lebih sejahtera. Berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh BPS, maka NTP didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani. Sejak tahun 2021 Capaian kedua komponen NTP Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18 Capaian Komponen Nilai Tukar Petani

Komponen NTP	Capaian			
	Des 2021	Des 2022	Des 2023	Des 2024
Indeks diterima Petani	113.96	125.53	141.86	140.39
Indeks dibayar Petani	110.45	117.02	121.13	124.25

Peningkatan nilai tukar petani sebagai indikator dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Boyolali dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian

Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian tahun 2024 sebesar 2.99%, sementara tahun 2023 sebesar 1.47%, sehingga tahun 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 1.52 poin. Upaya peningkatan PDRB sektor pertanian tersebut dilaksanakan melalui peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan produksi sub sektor peternakan dan perikanan, dengan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, penyuluhan pertanian, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan perikanan budidaya, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penyediaan dan penegmbangan prasarana peternakan, perizinan usaha pertanian, yang diarahkan pada pengendalian alih lahan pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan air, peningkatan irigasi permukaan, pembangunan dan pemeliharaan bendungan, pemeliharaan saluran irigasi, pembangunan dan pemeliharaan pintu air, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan irigasi air tanah dalam dan dangkal, pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok tani, penggunaan benih yang bersertifikat, peningkatan produksi hasil pertanian, pemberian bantuan benih, dan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, fasilitasi bantuan sarana prasarana budi daya, pengembangan kapasitas pembudidaya ikan, pendampingan bagi nelayan kecil, fasilitasi bantuan pembiayaan dan asuransi usaha perikanan, pemberian bimbingan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan, pelayanan pengobatan ternak, penanganan dan pemberian bantuan ternak yang terkena penyakit menular, pemberian vaksin kepada ternak, pelayanan jasa laboratorium guna pemeriksaan sampel penyakit hewan, fasilitasi pemotongan hewan (sapi), pemberian bantuan peralatan pengolahan pakan ternak, pelatihan peningkatan mutu produk peternakan, fasilitasi pengujian mutu pakan, fasilitasi izin usaha pemeliharaan hewan.

2. Meningkatkan kualitas susu

Boyolali merupakan salah satu kota penghasil susu terbesar di Jawa Tengah. Produksi susu tahun 2024 mencapai 42.759.750 liter yang meningkat dari tahun 2023 sebesar 37.804.724 liter. Produksi susu tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani jika susu yang dihasilkan mempunyai kualitas yang memenuhi syarat bagi perusahaan susu lokal maupun nasional, sehingga petani tidak kesulitan dalam pemasaran produk karena sudah dapat ditampung oleh perusahaan tertentu. Pada tahun 2024 tercatat peningkatan perusahaan yang menerima produk susu Boyolali sejumlah 10 perusahaan, dari sebelumnya hanya 5 perusahaan. Semakin banyak perusahaan yang menerima produk susu dari petani/peternak, menunjukkan kualitas susu yang dihasilkan semakin baik dan memenuhi standart dari perusahaan. Upaya untuk peningkatan kualitas susu dilaksanakan melalui pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan

dengan program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, yang diarahkan pada pendampingan unit usaha produk hewan khususnya susu dan pelaksanaan pameran atau festival susu.

3. Meningkatkan agro industri susu

Susu sapi merupakan salah satu produk yang tidak tahan lama, sehingga diperlukan adanya kreativitas untuk pengolahan dalam bentuk produk lain sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan menghindari adanya kerugian bagi petani atau pengusaha kecil. Meningkatnya agro industri susu yang ditandai dengan persentase peningkatan pendapatan sektor industri susu terealisasi sebesar 3.6%. Pendapatan agro industri susu tahun 2024 sebesar Rp13.860.498.000,00, sedangkan tahun 2023 sebesar Rp13.378.860.000,00, sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp481.638.000,00. Upaya peningkatan agro industri susu dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan susu dan pengembangan industri susu dengan program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri serta perencanaan dan pembangunan industri yang mengarah pada peningkatan produksi susu dan promosi produk olahan susu.

4. Meningkatkan ketahanan pangan

Indeks Ketahanan Pangan tahun 2024 sebesar 87.7, sementara tahun 2023 sebesar 87.31, sehingga tahun 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 0.39. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat yang ditandai dengan adanya ketersediaan, keterjangkauan serta stabilitas harga dan pangan. Upaya peningkatan indeks ketahanan pangan dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan akses distribusi pangan, peningkatan keamanan dan pengawasan pangan, peningkatan pemanfaatan pangan yang bervariasi, dengan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan keamanan pangan, yang mengarah pada penyediaan cadangan pangan, pembangunan lumbung pangan, pembinaan kelompok lumbung pangan, penyediaan informasi harga pangan, pemantauan stok dan pasokan pangan, pengembangan jaringan distribusi pangan, penyusunan dan pemutakhiran peta kerawanan dan kerentanan pangan, pengawasan pangan segar, pelatihan pengolahan pangan lokal, pemberian bantuan bibit dan sarana tanam pekarangan lestari, pembinaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi.

Adapun kendala atau permasalahan yang ditemui dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani adalah sebagai berikut:

1. Semakin berkurangnya tenaga kerja yang menangani pertanian, karena sebagian besar tenaga pertanian adalah generasi tua, sehingga semakin hari berkurang akibat usia dan tenaga yang sudah tidak memungkinkan, Atas hambatan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pertanian menggandeng generasi muda dengan mendata terlebih dahulu jumlah petani milenial, selanjutnya memberikan sosialisasi dan pelatihan khusus bagi pemuda untuk pemanfaatan, pengolahan, dan pengembangan lahan pertanian.
2. Akibat maraknya makanan instan yang beredar menyebabkan masyarakat kurang memahami tentang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan pentingnya pangan lokal, atas kendala tersebut, maka dilakukan sosialisasi pangan B2SA dan promosi pangan lokal bagi masyarakat.
3. Adanya pembatasan kuota penerimaan susu dari industri pengolahan susu menyebabkan produksi susu dari peternak tidak terdistribusi secara baik, yang

menyebabkan kerugian bagi peternak. Atas hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Koperasi guna peningkatan penyerapan susu lokal oleh industri pengolahan susu di Boyolali, disamping itu dilakukan pula pembinaan kepada peternak, agar meningkatkan kualitas susu yang dihasilkan agar dapat memenuhi kualitas mutu dari industri pengolahan susu.

Peningkatan kesejahteraan petani dengan capaian kinerja sebesar 102.71%, didukung dengan penganggaran sebesar Rp37.026.054.000,00 dan realisasi sebesar Rp34.541.940.208,00 dengan capaian 93.29% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 6.71%. Adapun upaya pencapaian target tujuan keenam tersebut didukung dengan 15 (lima belas) program, sebagai berikut:

1. Program pengelolaan sumber daya air;
2. Program pengelolaan perikanan tangkap;
3. Program pengelolaan perikanan budidaya;
4. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
5. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
6. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
7. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
8. Program perizinan usaha pertanian;
9. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
10. Program penyuluhan pertanian;
11. Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas;
12. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
13. Program peningkatan diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
14. Program penanganan kerawanan pangan; dan
15. Program pengawasan keamanan pangan.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

TUJUAN 7 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik

Tabel 3.19 Pencapaian Kinerja Tujuan 7

Indikator kinerja utama	Target 2024	Realisasi				Capaian 2024
		2021	2022	2023	2024	
Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	893	833	843	893	893	100%

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 7

Indikator kinerja utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2024	Progres	Realisasi Nasional	Keterangan
Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	903	893	93%	-	-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024 sebesar 100% dari target sebesar 893 terealisasi sebesar 893. Angka tersebut tidak mengalami kenaikan dari tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka upaya meningkatkan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah di Boyolali telah mengalami pergerakan sebesar 93% dari data awal tahun 2020 sebesar 763.

Sedangkan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tidak dapat disandingkan karena Kementerian Dalam Negeri tidak mempublikasikan angka indeks penyelenggaraan pemerintah daerah secara keseluruhan, melainkan Pemerintah Daerah menghitung sendiri angka tersebut dengan formulasi yang telah ditetapkan melalui aplikasi simona sebagai dasar penghitungan besaran maksimal Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/13218/SJ tanggal 27 November 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah melalui Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.10 Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2020- 2024



Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 061-5449 tahun 2019 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya diikuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/13218/SJ tanggal 27 November 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah melalui Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa komponen Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit sebesar 90% dan variabel hasil sebesar 10%. Adapun variabel pengungkit terdiri dari 7 (tujuh) variabel yaitu:

1. Opini laporan keuangan;
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
3. Kematangan penataan Perangkat Daerah;
4. Indeks Inovasi Daerah;
5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
6. Rasio belanja Perjalanan Dinas; dan
7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Sedangkan variabel hasil meliputi 2 (dua) variabel yaitu: Indeks pembangunan manusia dan indeks gini ratio.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka capaian variabel Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21 Capaian Variabel IPPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2024

Variabel IPPD	Realisasi			
	2021	2022	2023	2024
Opini laporan keuangan;	WTP	WTP	WTP	WTP
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);	-	2.81	3.40	3.40
Kematangan penataan Perangkat Daerah;	36.6	37.23	37.3	37.53
Indeks Inovasi Daerah;	48.99	5742	78.51	83.64
Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;	1.2	1.3	1.3	1.3
Rasio belanja Perjalanan Dinas; dan	1	1.9	2.5	2.5
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.	63.60	68.76	76.94	83.35
Indeks pembangunan manusia	74.4	74.97	75.41	75.96
indeks gini ratio	0.368	0.366	0.369	0.367

Faktor penunjang keberhasilan dalam peningkatan Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas keuangan daerah ditandai dengan 2 (dua) indikator, yaitu:
 - 1) Opini BPK

Opini BPK tahun 2024 adalah WTP sebagaimana target yang ditetapkan yaitu WTP. Kabupaten Boyolali telah meraih opini WTP selama tiga belas tahun berturut-turut, sejak tahun 2012. Upaya mendapatkan Opini WTP tersebut dilaksanakan melalui peningkatan efektivitas penatausahaan, pengamanan dan pemanfaatan aset daerah serta penguatan sistem

pengendalian intern Pemerintah, dengan program pengelolaan barang milik Daerah dan penyelenggaraan pengawasan, yang diarahkan pada penataan, inventarisasi, pengamanan dan penilaian barang milik Daerah, optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah, pengawasan dan review kinerja dan keuangan daerah, keungan desa, monev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

2) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024 sebesar 80.27, mengalami peningkatan sebesar 10.72 dari tahun 2023. Upaya peningkatan IPKD dilaksanakan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dengan program pengelolaan pendapatan Daerah, yang diarahkan pada pengelolaan pendapatan Daerah, penggalian potensi pajak Daerah, serta pemberian kemudahan bagi pembayar pajak melalui sipad.boyolali.go.id, disamping itu adanya pemasangan *tapping box* di sejumlah restoran, hotel dan tempat karaoke dan taman wisata, guna memudahkan pemantauan dan pengawasan bagi wajib pajak, sehingga meminimalisir penyelewengan pajak, kemudahan pembayaran pajak juga dilakukan melalui aplikasi sipad.go.id, yang menampilkan tagihan pajak dan pembayaran pajak secara *online*.

Kedua indikator diatas memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan kapasitas keuangan daerah dan akan berpengaruh pula pada skor opini BPK yang memberi kontribusi sebesar 10% terhadap Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Meningkatkan integritas dan kapasitas pemerintah daerah

Peningkatan integritas dan kapasitas pemerintah daerah ditandai dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1) Indeks profesionalitas Pegawai

Indeks Profesionalitas Pegawai tahun 2024 sebesar 80.61, meningkat cukup tinggi dari tahun 2023 yaitu sebesar 4.81. Upaya peningkatan indeks profesionalitas pegawai dilaksanakan melalui peningkatan efektivitas penerapan sistem merit dalam birokrasi, dengan pemenuhan dan pemerataan kebutuhan aparatur, peningkatan kompetensi manajerial dan teknis aparatur monitoring dan evaluasi kinerja aparatur, dan pembinaan disiplin dan peningkatan kinerja aparatur, serta pemberian *reward* dan *punishment* kepada ASN.

2) Nilai survei penilaian integritas

Hasil survei penilaian integritas tahun 2024 sebesar 75.98, mengalami penurunan dari hasil tahun 2022 sebesar 12.35. Upaya peningkatan hasil survei penilaian integritas dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah, dengan program penyelenggaraan pengawasan aerah, dan program perumusan kebijakan, pendampingan, asistensi, yang diarahkan pada melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu, koordinasi dengan pihak terkait dalam monitoring, evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi, melakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi.

Kedua indikator diatas memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan integritas dan kapasitas pemerintah daerah dan akan berpengaruh pada skor indeks Reformasi Birokrasi yang memberi kontribusi sebesar 30% terhadap Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

-
3. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditandai dengan 3 (tiga) indikator yaitu:
- 1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 68.96, mengalami kenaikan sebesar 0.68 dari tahun 2023. Upaya peningkatan nilai SAKIP dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, peningkatan kualitas perencanaan daerah dan pembangunan kelembagaan berbasis kinerja, dengan program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah, Penyelenggaraan Statistik sektoral dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang diarahkan pada Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diawali dengan pendampingan penyusunan perencanaan perangkat daerah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, penyediaan data statistik sektoral, penyusunan laporan kinerja, dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang menjadi bagian dari kinerja utama setiap Perangkat Daerah.
 - 2) Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Indeks RB tahun 2024 sebesar 83.35 meningkat sebesar 6.41 dari tahun 2023. Upaya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui perubahan dokumen perencanaan dan pelaksanaan *roadmap* Reformasi Birokrasi yang meliputi variabel general dan tematik, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 Variabel general meliputi berbagai perangkat terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, cara kerja, strategi, sistem dan regulasi dalam pemerintahan serta budaya dan sumber daya manusia sedangkan variabel tematik meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi Pemerintahan serta percepatan prioritas aktual Presiden, disamping itu juga penyusunan rencana aksi dan monitoring pelaksanaannya setiap tiga bulan serta penilaian mandiri dari Inspektorat terhadap rencana aksi dan monitoring capaian yang tertuang dalam LHE *on going* dan LHE *ex ante* dan diinput dalam *portalrb.go.id* secara berkala.
 - 3) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Nilai EKPPD tahun 2023 sebesar 3.40, mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu sebesar 0.59. Sedangkan untuk tahun 2024, sampai saat penyusunan dokumen ini belum ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan nilai secara resmi. Upaya peningkatan nilai EKPPD dilaksanakan melalui peningkatan efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah, peningkatan kapasitas tata kelola Pemerintah Desa, dan peningkatan peran penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan, dengan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, penataan Desa, pengembangan penelitian dan pengembangan daerah, yang diarahkan pada fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, penataan administrasi Pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, fasilitasi dan koordinasi hukum, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, fasilitasi tata wilayah Desa dan fasilitasi sarana dan prasarana Desa, pelaksanaan riset pada berbagai bidang yang diperlukan, penjaringan inovasi masyarakat dan Perangkat Daerah, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.

Ketiga indikator diatas memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan akan berpengaruh pula pada skor indeks Reformasi Birokrasi dan skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah yang masing-masing memberi kontribusi sebesar 30% terhadap Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. Meningkatkan *smart governance* Boyolali

Pengembangan *smart governance* Boyolali ditandai dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

1) Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 3.89, mengalami kenaikan sebesar 0.24 dari tahun 2023. Upaya peningkatan Indeks SPBE dilaksanakan melalui penguatan inovasi dan adaptasi teknologi terpadu dan penguatan kualitas keamanan dan informasi Daerah, dengan program aplikasi informasi, dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yang diarahkan pada fasilitasi pembuatan dan pemeliharaan aplikasi, penyediaan dan pemeliharaan jaringan, pemantauan pemanfaatan domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan, serta pengamanan informasi Pemerintahan.

2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 sebesar 89.53, mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun 2023 sebesar 3.75. Upaya peningkatan keterbukaan informasi publik dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan informasi publik, dengan program informasi dan komunikasi publik, yang diarahkan pada pemberian informasi perkembangan Kabupaten Boyolali, kepada masyarakat melalui media yang telah disediakan secara online pada website boyolali.go.id.

Kedua indikator diatas memberi pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan *smart governance* dan akan berpengaruh pada skor indeks Reformasi Birokrasi yang memberi kontribusi sebesar 30% terhadap Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik ditandai dengan Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebesar 84.65, meningkat dari tahun 2023 sebesar 0.3. Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi salah satu indikator yang berpengaruh pada skor indeks Reformasi Birokrasi yang memberi kontribusi sebesar 30% terhadap Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Upaya peningkatan kepuasan masyarakat dilaksanakan melalui penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas petugas pelayanan, fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa, dengan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengelolaan profil kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, penyelenggaraan Pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa, yang diarahkan pada pembinaan, penyelenggaraan pelayanan publik, monitoring dan evaluasi pelayanan publik, peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, dan sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Upaya lain yang dilakukan dalam mempercepat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu dengan pembangunan satu data Boyolali melalui *Monitoring Center For Development* (MCD) Boyolali, guna mendapatkan data yang *valid* dan *update*. Selain itu juga dilakukan pendampingan kepada seluruh Perangkat

Daerah dari Tim yang terdiri dari Auditor yang bertugas mendampingi Perangkat Daerah dalam percepatan pencapaian target kinerja.

Adapun kendala atau permasalahan yang ditemui dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan kategori dalam penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), sehingga memberi dampak pada capaian nilai IPPD. Atas perubahan tersebut maka dalam perhitungan IPPD pada nilai EKPPD tetap memakai kategori pada aturan sebelumnya;
2. Keterbatasan pengetahuan Perangkat Desa tentang tugas pokok fungsinya dan administrasi Desa, atas hambatan tersebut maka dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi perangkat Desa terkait tugas pokok dan peraturan baru yang harus diikuti dalam penyusunan administrasi Desa;
3. Keterbatasan kualitas sumber daya aparatur pengelola teknologi informasi, sehingga beberapa Perangkat Daerah menemui kendala dalam mempublikasikan informasi dan perkembangan kinerjanya, atas hambatan tersebut dilakukan pelatihan dalam penggunaan teknologi informasi bagi Perangkat Daerah.

Terwujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dengan capaian kinerja sebesar 100%, didukung dengan penganggaran sebesar Rp1.540.791.714.157,00 dan realisasi sebesar Rp1.470.296.844.629,00 dengan capaian 95.42% sehingga terdapat efisiensi sebesar 4.58%. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dilaksanakan melalui 26 (dua puluh enam) program, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program pengelolaan arsip;
2. Program perlindungan dan penyelamatan arsip;
3. Program administrasi pemerintahan desa;
4. Program kepegawaian daerah;
5. Program pengembangan sdm;
6. Program penyelenggaraan pengawasan daerah;
7. Program perumusan kebijakan, pendampingan, asistensi;
8. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
9. Program perekonomian dan pembangunan;
10. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
11. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
12. Program penelitian dan pengembangan daerah;
13. Program pengelolaan keuangan daerah;
14. Program pengelolaan barang milik daerah;
15. Program pengelolaan pendapatan daerah;
16. Program informasi dan komunikasi publik;
17. Program penyelenggaraan statistik sektoral;
18. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
19. Program pendaftaran penduduk;
20. Program pencatatan sipil;
21. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
22. Program penunjang urusan pemerintahan daerah;
23. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
24. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
25. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; dan
26. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta

peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

TUJUAN 8 : Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali

Tabel 3.22 Pencapaian Kinerja Tujuan 8

Indikator kinerja utama	Target 2024	Realisasi				Capaian 2024
		2021	2022	2023	2024	
Indeks kualitas lingkungan hidup	66.6	63.93	60.77	61.39	65.49	98.33%
Indeks smart city	3.3	3.31	3.15	3.3	3.65	110.61%

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 8

Indikator kinerja utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2024	Progres	Realisasi Nasional	Keterangan
Indeks kualitas lingkungan hidup	66.71	65.49	81%	73.53	- 8.04
Indeks smart city	3.28	3.65	200%	3.93	- 0.28

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2024 sebesar 98.33% dari target sebesar 66.6 terealisasi sebesar 65.49.

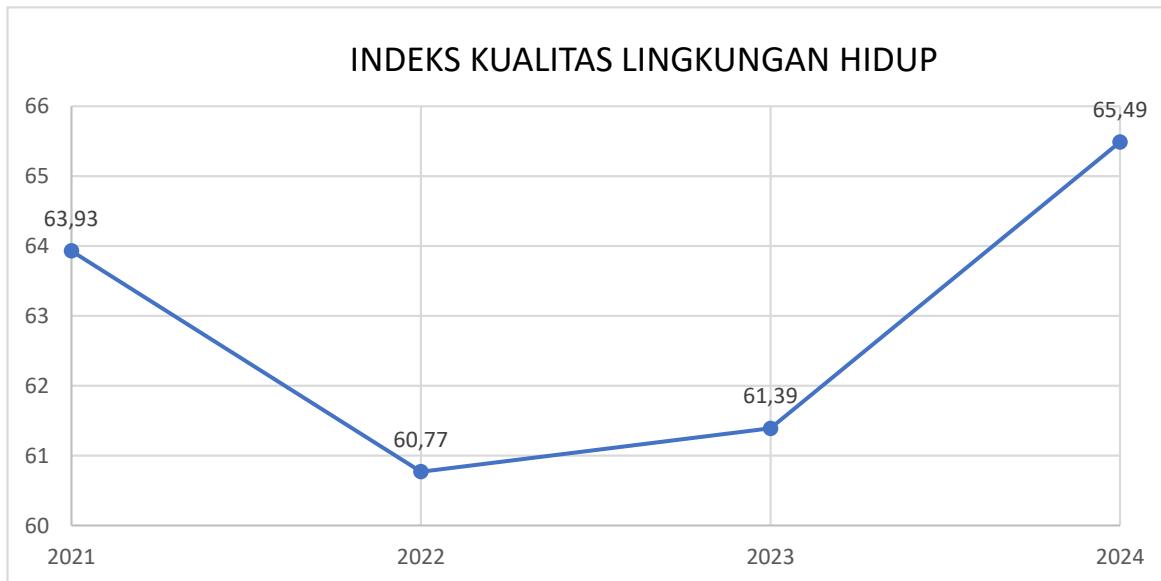
Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 4.1, dimana indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2023 tercatat sebesar 61.39.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka upaya meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup di Boyolali telah pergerakan sebesar 81% dari data awal tahun 2020 sebesar 60.17.

Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks kualitas lingkungan hidup secara nasional, Kabupaten Boyolali tertinggal cukup jauh yaitu sebesar 8.04, dimana realisasi nasional sebesar 73.53.

Perkembangan indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021 - 2024



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup merupakan perpaduan antara konsep indeks kualitas lingkungan dan konsep *environmental performance indeks*. IKLH digunakan sebagai komponen penilaian kinerja perbaikan kualitas lingkungan hidup, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komponen dalam perhitungan IKLH meliputi: Indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan. Adapun capaian komponen IKLH Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24 Capaian Komponen IKLH Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2024

Komponen IKLH	Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Indeks kualitas air	52.5	48.42	50.00	60.59
Indeks kualitas udara	88.17	84.18	82.55	83.34
Indeks kualitas tutupan lahan	38.71	38.71	41.82	40.91

Faktor yang menyebabkan kurang optimalnya peningkatan Indeks kualitas lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya peningkatan kualitas air
Peningkatan kualitas air ditandai dengan indeks kualitas air. *National Sanitation Foundation Water Quality Index* (NSF-WQI) atau Indeks Kualitas Air (IKA) ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan. Indeks kualitas air ini didasarkan pada 9 parameters yang mencakup: *BOD, DO, nitrate, total phosphate, temperature, turbidity, total solids, pH, and Fecal Coliform*. Indeks kualitas air tahun 2024 sebesar 60.59, mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu sebesar 10.59, namun peningkatan tersebut belum mampu memberikan kontribusi secara optimal terhadap peningkatan indeks kualitas lingkungan. Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kualitas air melalui pengendalian pencemaran limbah dengan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3) beserta limbah B3, perencanaan lingkungan hidup dan penanganan pengaduan lingkungan hidup, yang diarahkan pada pembinaan pengelolaan air limbah,

pembangunan dan pemanfaatan IPAL Biogas, pembangunan sumur resapan, penghijauan, fasilitasi rekomendasi izin penyimpanan sementara LB3, penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penanganan pengaduan lingkungan hidup, dan pengujian dan pemantauan kualitas air.

2) Belum optimalnya peningkatnya kualitas udara

Peningkatan kualitas udara ditandai dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara tahun 2024 sebesar 83.34, mengalami kenaikan sebesar 0.79 dari tahun 2023, namun peningkatan tersebut belum mampu memberikan kontribusi secara optimal terhadap peningkatan indeks kualitas lingkungan. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas udara melalui pengendalian pencemaran udara dengan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang diarahkan pada pembinaan pengelolaan kualitas udara kepada dunia usaha dan pembinaan serta fasilitasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim dan mengurangi volume gas rumah kaca.

3) Penurunan kualitas tutupan lahan

Kualitas tutupan lahan ditandai dengan indeks kualitas tutupan lahan. Indeks kualitas tutupan lahan tahun 2024 sebesar 40.91, mengalami penurunan sebesar 0.91 dari tahun 2023. Penurunan kualitas tutupan lahan tersebut memberikan kontribusi atas belum optimalnya kualitas lingkungan hidup. Upaya peningkatan kualitas tutupan lahan dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dengan program pengelolaan keanekaragaman hayati yang diarahkan pada pengelolaan kebun raya indrokilo, pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

4) Belum optimalnya peningkatnya penanganan/ pengelolaan sampah

Penanganan/ pengelolaan sampah menjadi hal penting dalam kelestarian alam yang berpengaruh pada kualitas air, udara dan tutupan lahan. Persentase sampah yang tertangani/ terkelola tahun 2024 sebesar 61.6%, mengalami kenaikan sebesar 2.99 dari tahun 2023, namun peningkatan tersebut belum mampu memberikan kontribusi secara optimal terhadap peningkatan indeks kualitas lingkungan. Peningkatan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui optimalisasi pengelolaan sampah dengan program Pengelolaan persampahan yang diarahkan pada penyediaan sarana prasarana tempat pembuangan sampah akhir, pengelolaan 3R, dan sosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

2. Indeks *Smart City*

Dari tabel 3.22 dan 3.33 dapat disimpulkan bahwa capaian indeks *smart city* tahun 2024 sebesar 110.61% dari target sebesar 3.3 terealisasi sebesar 3.65

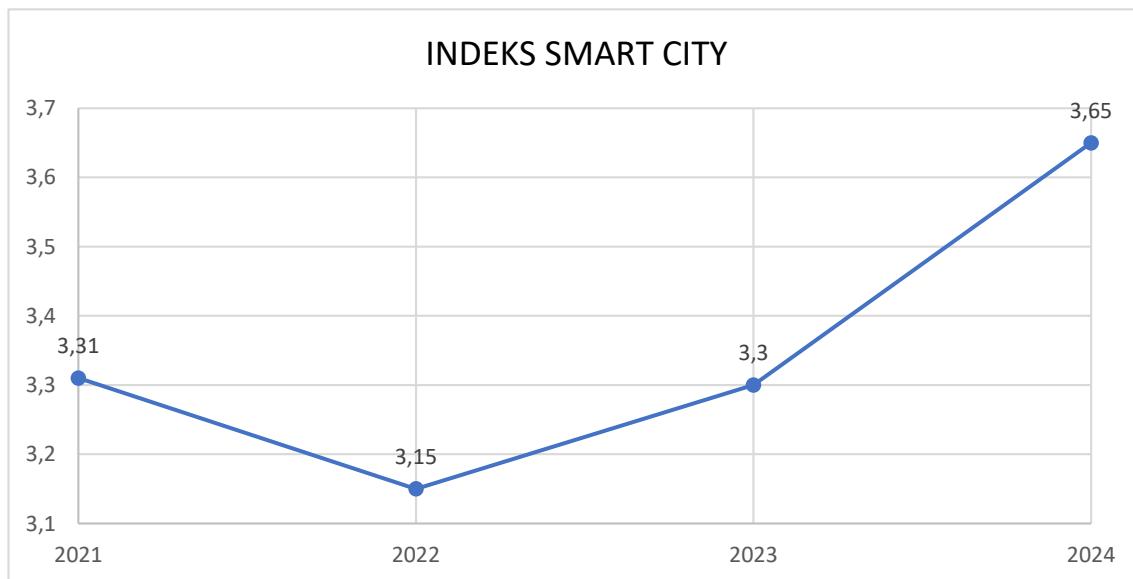
Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 0.35, dimana indeks *smart city* tahun 2023 tercatat sebesar 3.3

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka upaya meningkatkan indeks *smart city* di Boyolali telah melampaui target akhir RPJMD. Target akhir RPJMD akan diperbaiki secara berkala melalui Perjanjian Kinerja atau perjanjian Kinerja perubahan setiap tahunnya.

Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks *smart city* tertinggi Kabupaten/Kota secara nasional maka masih tertinggal sebesar 0.28, dimana indeks *smart city* tertinggi yaitu Kota Bandung dengan angka 3.93.

Indeks *smart city* di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.12 Indeks Smart City Tahun 2021-2024



Menurut pendapat dari Pakar dari Institut Teknologi Bandung Suhono S.Supangat, kota cerdas (*smart city*) adalah kota yang paling cepat dan akurat memberikan solusi kepada warganya. Konsep *smart city* terdiri dari komponen-komponen pendukung yaitu: *smart economy*, *smart people*, *smart governance*, *smart mobility*, *smart environment*, dan *smart living*. Penilaian indeks *smart city* meliputi penilaian yang dimulai dari *baseline*, *output*, *outcome*, *quickwin* dan kolaborasi.

Faktor pendukung keberhasilan dalam peningkatan Indeks *smart city* adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pemukiman berbasis *smartness* dilihat dengan 4 (empat) indikator yaitu:
 - (1) Persentase layanan publik dan pengaduan *online* yang aktif
Penyediaan layanan publik dan pengaduan *online* yang aktif tahun 2024 dengan capaian 100%, capaian tersebut senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan guna mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan melalui media sosial yang tersedia serta kanal pengaduan lain yang dipantau dan dikelola dengan baik. Penyediaan layanan publik dan pengaduan *online* dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan aplikasi layanan publik, dengan program aplikasi informatika, yang diarahkan pada fasilitasi pembuatan aplikasi pelayanan publik.
 - (2) Luas kawasan kumuh
Luas kawasan kumuh tahun 2024 tersisa sebesar 0.4 ha, berkurang dari tahun 2023 yaitu sebesar 31.32 ha. Pengurangan luasan kawasan kumuh dilaksanakan melalui optimalisasi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh, dengan program kawasan permukiman, yang diarahkan pada kemudahan fasilitasi penerbitan izin perumahan, penyusunan peta

- perumahan dan kawasan permukiman, survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh, peningkatan kualitas kawasan kumuh, penanganan kawasan kumuh, dan pembangunan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- (3) kemudahan akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan tahun 2024 terealisasi sebesar 97.56%, meningkat sebesar 1.12 dari tahun 2023. Upaya peningkatan akses rumah tangga terhadap layanan sumber air minum layak dilaksanakan melalui peningkatan akses air bersih, melalui program pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, yang diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, pembangunan sumur air tanah, tanggul sungai, penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA, pembangunan dan pemeliharaan jaringan perpipaan untuk air minum.
- (4) kemudahan akses terhadap sanitasi yang layak dan berkelanjutan tahun 2024 sebesar 98,33%, meningkat dari tahun 2023 sebesar 0.03. Upaya peningkatan akses terhadap sanitasi yang layak dilaksanakan melalui pengembangan sanitasi individual dan komunal, dengan program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, yang diarahkan pada sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik.
- 2) Meningkatkan akses rumah layak huni
- Peningkatan akses rumah layak huni ditandai dengan cakupan rumah layak huni tahun 2024 sebesar 94.25%, meningkat dari tahun 2023 sebesar 2.65. Peningkatan akses rumah layak huni dilaksanakan melalui penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan RLH bagi masyarakat yang terdampak relokasi, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan fasilitasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, dengan program kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman, yang diarahkan pada identifikasi data rumah korban bencana dan rumah yang terkena relokasi, rehabilitasi dan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana, pelayanan penerbitan izin perumahan, penyusunan peta perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Upaya peningkatan rumah tidak layak huni juga dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Desa dan Baznas.
- 3) Meningkatkan kualitas bangunan dan penataan ruang ditandai dengan 2 (dua) indikator) yaitu:
- (1) Persentase bangunan yang sesuai standart tahun 2024 sebesar 93%. menurun dari tahun sebelumnya sebesar 1.23. Upaya peningkatan bangunan sesuai standart dilaksanakan melalui pemeliharaan dan rehabilitasi gedung fasilitas publik yang memadai, optimalisasi layanan jasa konstruksi, optimalisasi penyelesaian konflik pertanahan, dengan program penataan bangunan dan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi, dan penyeleiaian sengketa tanah garapan, yang diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan gedung fasilitas publik, penerbitan rekomendasi PBG, penataan lingkungan dan gedung kantor, peningkatan kualitas tenaga terampil konstruksi, pelayanan penerbitan SIUJK, dan mediasi penyelesaian sengketa tanah.
- (2) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2024 sebesar 97.62%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0.81. Upaya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, dengan program penyelenggaraan penataan ruang, yang mengarah pada penyusunan

rencana detail tata ruang, pemanfaatan sistem informasi tata ruang dan pelayanan pemberian rekomendasi pemanfaatan tata ruang.

Adapun kendala atau permasalahan yang ditemui dan solusi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kenyamanan hidup di Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Adanya tren penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) secara Global, terutama wilayah Solo Raya. Hipotesis menunjukkan bahwa terdapat suatu kondisi tertentu, yang terjadi di dalam cakupan wilayah yang luas, yang mengakibatkan penurunan indeks kualitas air di berbagai wilayah, yang sampai saat ini belum dapat disimpulkan faktor utama yang menjadi penyebab kondisi tersebut. Atas permasalahan tersebut maka dilaksanakan suatu tindakan preventif dan proaktif guna meminimalisir dampak yang disebabkan baik yang berasal dari alam maupun dari manusia.
2. Laju pertumbuhan Ruang Terbuka Hijau yang tidak dapat megimbangi area yang terpapar polusi udara. Salah satu faktor penyebab meningkatnya polusi udara adalah bidang transportasi. Semakin tingginya penggunaan kendaraan bermotor yang berdampak terhadap semakin buruknya kualitas udara yang dihasilkan. Atas permasalahan tersebut maka dilaksanakan upaya untuk meningkatkan jumlah tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi seperti area industri dan transportasi, mengingat salah satu kegunaan tumbuhan adalah sebagai indikator pencemaran dini, selain sebagai penyerap debu dan bahan partikel lain (PM10 dan PM 2,5)
3. Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat. Atas permasalahan tersebut maka Pemerintah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa guna pembinaan dan sosialisasi guna membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah di lingkungan sekitar.
4. Kondisi geografis pada sebagian wilayah Kabupaten Boyolali yang kering dan poros, menyebabkan adanya kendala dalam pencarian sumber air yang memenuhi syarat. Atas permasalahan tersebut maka setahun sebelumnya telah dilakukan studi geolistrik yang merupakan metode geofisika yang bertujuan mengetahui sifat-sifat kelistrikan lapisan batuan dibawah permukaan tanah dengan cara menginjeksikan arus listrik kedalam tanah, sehingga dapat memberikan informasi data dibawah permukaan tanah yang menyangkut struktur geologinya, sebagai dasar penentuan pelaksanaan pemboran.
5. Peningkatan akses rumah layak huni terkendala dengan kemampuan atau keterbatasan masyarakat dalam berswadaya. Atas permasalahan tersebut Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan masyarakat serta pembiayaannya bekerjasama dengan bank dengan suku bunga rendah, sehingga masyarakat bisa membayar dengan cara kredit.
6. Masih adanya kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang daerah. Atas permasalahan tersebut maka dilakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang rencana tata ruang Daerah, agar masyarakat lebih memahami pemanfaatan tanah sesuai ketentuan.

Peningkatan kenyamanan hidup di Kabupaten Boyolali dengan capaian kinerja sebesar 104.47%, didukung dengan penganggaran sebesar Rp90.671.885.000,00 dan realisasi Rp85.094.627.563,00 dengan capaian sebesar 93.85%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 6.15%. Adapun upaya pencapaian target kinerja tujuan kedelapan ini dilaksanakan melalui 16 (enam belas) program, sebagai berikut:

-
1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
 3. Program penataan bangunan gedung;
 4. Program penataan bangunan dan lingkungannya;
 5. Program penyelesaian sengketa tanah garapan;
 6. Program penyelenggaraan penataan ruang;
 7. Program informasi dan komunikasi publik;
 8. Program perencanaan lingkungan hidup;
 9. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 10. Program pengelolaan keanekaragaman hayati;
 11. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 12. Program pengelolaan persampahan;
 13. Program pengembangan perumahan;
 14. Program kawasan permukiman;
 15. Program perumahan dan kawasan permukiman; dan
 16. Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 untuk belanja sebesar Rp2.562.353.520.000,00, dan dana tersebut digunakan sebesar Rp2.418.557.735.103,00 atau 94.39%. Berikut perbandingan anggaran Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dan Tahun 2024:

Tabel 3.25 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 - 2024

URAIAN	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
BELANJA	2.538.758.283.000	2.415.957.200.375	2.562.353.520.000	2.418.557.735.103
BELANJA OPERASI	1.642.240.257.400	1.541.344.967.214	1.761.753.566.000	1.700.532.066.479
▪ Belanja Pegawai	961.195.127.000	914.044.381.109	980.385.261.000	954.885.960.879
▪ Belanja Barang dan Jasa	568.352.110.400	533.563.259.960	661.265.104.000	626.496.234.909
▪ Belanja Hibah	75.084.855.000	56.503.583.645	97.477.401.000	96.933.680.691
▪ Belanja Bantuan Sosial	37.608.165.000	37.233.742.500	22.625.800.000	22.216.190.000
BELANJA MODAL	471.694.238.600	453.924.865.491	344.584.201.000	288.527.089.841
▪ Belanja Modal Tanah	4.220.000.000	3.438.098.494	100.000.000	-
▪ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.917.410.000	111.153.641.092	71.105.954.000	68.491.943.141
▪ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187.257.424.000	182.322.750.909	121.571.155.000	97.204.458.497
▪ Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi	153.271.264.000	147.107.737.578	142.735.004.000	113.787.519.573
▪ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.835.140.600	9.731.632.918	8.168.024.000	8.158.189.680
▪ Belanja Modal Aset Lainnya	193.000.000	171.004.500	904.064.000	884.978.950
BELANJA TIDAK TERDUGA	15.383.500.000	13.324.273.670	5000.000.000	973.047.000
BELANJA TRANSFER	409.440.287.000	407.363.094.000	451.015.753.000	428.525.531.783
▪ Belanja Bagi hasil	20.641.349.000	18.564.156.000	21.066.474.000	20.951.252.783
▪ Belanja Bantuan Keuangan	388.798.938.000	388.798.938.000	429.949.279.000	407.574.279.000

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali, 2024 (Realisasi APBD Tahun 2024 *unaudited*)

Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja tujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Per Tujuan Pembangunan Tahun 2024

NO	TUJUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	EFISI ENSI (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	172.779.908.000	137.828.797.935	79.77	89.58	-
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	1.276.364.000	1.255.434.080	98.36	65.88	-

NO	TUJUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	661.222.315.343	631.305.299.744	95.48	99.54	-
4	Meningkatnya ketahanan sosial	49.730.469.500	49.562.814.094	99.66	152.82	0.34
5	Meningkatnya Keberdayaan Sosial	8.854.810.000	8.671.976.850	97.94	102.7	2.06
6	Meningkatnya kesejahteraan petani	37.026.054.000	34.541.940.208	93.29	102.71	6.71
7	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1.540.791.714.157	1.470.296.844.629	95.42	100	4.58
8	Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali	90.671.885.000	85.094.627.563	93.85	104.47	6.15
TOTAL		2.562.353.520.000	2.418.557.735.103	94.39	106.70	5.61

3.4. Prestasi dan Penghargaan

Beberapa penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 yang merupakan apresiasi atas Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali antara lain:

- 1) Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia dalam penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Pelayanan Publik) Tahun 2024 dengan nilai 98,68 kategori zona hijau dengan kualitas tertinggi, diberikan kepada DPMPTSP Kabupaten Boyolali;
- 2) Apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai penyelenggara mal pelayanan publik tahun 2024 dengan predikat baik;

-
- 3) Apresiasi dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha tahun 2024 dengan predikat sangat baik;
 - 4) Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai Kabupaten Terinovatif dalam kompetisi *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2024;
 - 5) Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia dalam penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Pelayanan Publik) Tahun 2024 dengan nilai 97,65 Zona Hijau dengan Nilai 97,65 kategori zona hijau dengan kualitas tertinggi, diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
 - 6) Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2024, diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
 - 7) Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat A kategori layanan prima Tahun 2024, diberikan kepada Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
 - 8) Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai *Green Leadership “Nirwasita Tantra”* Tahun 2023;
 - 9) Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai Pemerintah Daerah dengan nilai sistem merit tahun 2024 sebesar 278,5 dengan predikat baik;
 - 10) Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai Pemerintah Daerah dengan nilai Indeks Profesionalitas ASN 80,64 dengan kategori sedang;
 - 11) Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali secara konsisten dengan Kategori B Predikat Baik;
 - 12) Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kepada PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Boyolali atas dukungan aktif dalam Proklam;
 - 13) Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional, diberikan kepada SMPN 1 Boyolali;
 - 14) Penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Kesehatan atas Pelaksanaan *Pilot Project* Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Nasional, diberikan kepada Desa Ngagrong, Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali;

-
- 15) Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atas pemenuhan Standardisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dengan Kategori Pratama Tahun 2024 kepada Perpustakaan Mutiara Ilmu Desa Gladagsari Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali;
 - 16) Penghargaan dari Kementerian Pertanian atas Program Pertambahan Areal Tanam 2024;
 - 17) Penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas keberhasilan penerapan lima pilar sanitasi total berbasis masyarakat kategori Madya;
 - 18) Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan keuangan Tahun 2023 dengan opini WTP;
 - 19) Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Adipura ke-15 kali tahun 2024;
 - 20) Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pelaksanaan Program Kampung Iklim, diberikan kepada:
 - a. Dukuh Munggur Desa Kembangsari Kecamatan Musuk;
 - b. Dusun Pongangan, Desa Jeruk, Kecamatan Selo;
 - c. Dukuh Wates Desa Cepogo Kecamatan Cepogo;
 - d. Desa Talakbroto Kecamatan Simo;
 - e. Dusun Slembi Desa Karangnongko Kecamatan Mojosongo;
 - f. Desa Tawangsari Kecamatan Teras;
 - g. Dukuh Karanganyar Desa Karanganyar Kecamatan Tamansari;
 - h. Dukuh Dayu Desa Jeruk Kecamatan Selo;
 - i. Dukuh Sokorejo Desa Candisari Kecamatan Gladagsari;
 - j. Dukuh Surodadi Desa Tarubatang Kecamatan Selo;
 - k. Dukuh Tlogolele Desa Tlogolele Kecamatan Selo;
 - l. Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak;
 - m. Dukuh Kentengsari Desa Jeruk Kecamatan Selo;
 - n. Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo;
 - o. Kelurahan Pulisen RW 1 Kecamatan Boyolali;
 - p. Dukuh Tritis Desa Jemowo Kecamatan Tamansari;
 - q. Desa Lampar Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali;
 - r. Dusun Stabelan, Desa Tlogolele, Kecamatan Selo;
 - s. Dukuh Gebyok Desa Samiran Kecamatan Selo.
 - 21) Penghargaan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas mitra kolaboratif inovatif Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

-
- 22) Penghargaan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagai Kabupaten terbaik dalam implementasi audit kasus stunting untuk 5 PASTI Seri I dan II Tahun 2024 dengan predikat terbaik I;
 - 23) Penghargaan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagai juara 3 nasional *poster competition audit* kasus stunting Indonesia 2024;
 - 24) Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Kabupaten/Kota Layak Huni Tahun 2024;
 - 25) Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pembina Desa terbaik I dalam percepatan penurunan stunting Tingkat Tahun 2024
 - 26) Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Rumah Sakit PONEK 24 Jam Terbaik III kategori Rumah Sakit Umum milik Pemerintah di Jawa Tengah Tahun 2024
 - 27) Penghargaan dari Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekolah Adiwiyata, diberikan kepada SMAN 1 Karanggede dan SMA Pradita Dirgantara Kec. Ngemplak
 - 28) Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Juara I video pendek budidaya pertembakauan;
 - 29) Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Kelurahan Mandiri sampah tahun 2024, diberikan kepada Kelurahan Pulisen;
 - 30) Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Desa Terinovatif Dalam Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024, diberikan kepada Desa Seboto, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali.

BAB IV PENUTUP

Hasil Pengukuran terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024, berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang terdiri dari 8 (delapan) tujuan dengan 12 (dua belas) indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja secara keseluruhan adalah 106.7% (Seratus enam koma tujuh persen) dengan kategori sangat tinggi, dengan rincian secara keseluruhan 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan capaian kinerja lebih dari 90% (kategori sangat tinggi), 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja antara 76-90% (kategori tinggi) dan 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja antara 51-65% (kategori rendah);

Capaian kinerja melampaui 100% tersebut didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung kinerja utama Pemerintah tahun 2024 melalui 119 program, sebesar Rp 2.562.353.520.000,00, terealisasi sebesar Rp 2.382.856.507.518,00 dengan capaian 92.99%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 7.01%. Capaian kinerja diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali telah berupaya dengan baik dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2024 yaitu peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan, pendampingan UMKM/IKM secara berkelanjutan, peningkatan keberdayaan masyarakat desa melalui optimalisasi potensi/aset desa, penguatan BUMDesa dan pembangunan kawasan pedesaan, peningkatan keberdayaan PMKS, dengan prioritas kelompok sasar penyandang disabilitas dan rehabilitasi ODGJ, dan pengelolaan sampah 3R berbasis komunitas di setiap desa dan kecamatan. Keberhasilan kinerja dapat dilihat dari adanya peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, penurunan risiko bencana, penekanan angka konflik sosial, penurunan angka PMKS, peningkatan kualitas Desa, peningkatan kualitas lingkungan serta peningkatan angka *smart city* Kabupaten Boyolali.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini disusun agar dapat menjadi bahan pencermatan untuk perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya dan tahun-tahun mendatang, sehingga pembangunan terus berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boyolali.



LAMPIRAN

Lampiran (tidak dicetak tapi diupload di esr.menpan.go.id), terdiri dari :

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2021-2026;
2. Cascade down IKU Perangkat Daerah 2021-2026;
3. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2024;
4. Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024;
5. Perjanjian Kinerja Bupati Perubahan Tahun 2024;
6. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2024;
7. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2024;
8. Laporan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024;